



LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2023 BPSPL MAKASSAR

*HASIL
REVIU*

MANA'AN KI

ZONA INTEGRITAS
ANTI KORUPSI & TOLAK GRATIFIKASI



BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian Tahun 2023. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Laporan ini telah dilakukan reviu oleh Sesditjen PKRL dan telah dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil reviu. Namun demikian, kami sadari bahwa Laporan Kinerja Hasil Reviu ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

Maros, 15 Februari 2024

**Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Permana Yudiarso'.

Permana Yudiarso, S.T., M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja (LKj) tahun 2023 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada tahun 2023 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023 terdiri atas enam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sepuluh Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Tahun 2023 adalah **113.05** untuk **IKU dan IKM**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKU 1) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar telah tercapai tiga dokumen dari target tiga dokumen berupa capaian dokumen laporan sosialisasi, verifikasi, dan monitoring pemanfaatan KKPRL.

(IKU 2) Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL telah tercapai tiga daerah atau provinsi dari target satu daerah dengan capaian provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo

(IKU 3) Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai tiga kelompok dari target tiga kelompok.

(IKU 4) Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai 10 jenis dari kegiatan pendataan, survei, sosialisasi, dan respon cepat dari target enam jenis.

(IKU 5) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai 10 jenis dari kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dari target lima jenis.

(IKU 6) Nilai PNBP BPSPL Makassar telah mencapai 882.681.302 rupiah dari target 675 juta rupiah dari PNBP pemanfaatan jenis ikan.

(IKM 7) Nilai IKPA BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 95.35 dari target 93.75.

(IKM 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 88.69 dari target 82.

(IKM 9) Nilai WBK BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 87.41 dari target 75. Nilai ini berdasarkan pantauan tahun 2022.

(IKM 10) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 90.89 dari target 85.

(IKM 11) Nilai PM SAKIP BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 84.2 dari target 75.

(IKM 12) Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target dengan empat target yang disusun setiap triwulan.

(IKM 13) Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai target dengan nilai 133.3 dari target 92.

(IKM 14) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai target dengan capaian 100 dari target 75.

(IKM 15) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100 dari target 100.

(IKM 16) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 100 dari target 77.5.

Total pagu anggaran tahun 2023 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 15.535.785.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni dan PNBPN dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 15.239.242.166,-** atau dengan prosentase sebesar **98.09%** dari pagu total. Selain itu terdapat blokir RO total sebesar **Rp 125.000.000** yang anggarannya tidak bisa dihapuskan dari pagu

CAPAIAN KINERJA BPSPL MAKASSAR TA 2023



Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di BPSPL Makassar

Target: 3 Dokumen
Realisasi: 3 Dokumen

Dokumen Sosialisasi, Verifikasi, dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Fasilitasi Pengusulan Penetapan KKPD di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Target: 1 Daerah
Realisasi: 2 Daerah

Penetapan KKP3K di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo



Bantuan Pemerintah untuk KOMPAK yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Target: 3 Kelompok
Realisasi: 3 Kelompok

Kelompok Konservasi Orca (Gorontalo), Laut Biru (Polewali Mandar), Lawarani (Palopo)

Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi

Target: 6 Jenis
Realisasi: 10 Jenis

Hiu Paus, Hiu Pari, BCF, Lumba-lumba, Dugong, Penyu, Karang, Sidat, Teripang, Anemon



Jenis Ikan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan

Target: 5 Jenis
Realisasi: 10 Jenis

Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Soft Coral, Anemon, BCF, Arwana, Napelon, Kuda Laut

Nilai PNBPs BPSPL Makassar

Target: Rp. 675.000.000,-
Realisasi: Rp. 882.681.302,-

PNBP berupa Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi / look alike berupa penerbitan dokumen angkut (Rekomendasi dan SAJ DN) dengan jenis pungutan yang dipungut adalah pungutan dokumen, pungutan pengambilan dari alam, dan pungutan perdagangan



Indikator Kinerja Manajemen (IKM)



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Target 93.75 Realisasi 95.35



Nilai Kinerja Anggaran

Target 82 Realisasi 88.69



Nilai Unit Kerja Bepredikat Menuju WBK

Target 75 Realisasi 87.41



Indeks Profesionalitas (IP) ASN

Target 85 Realisasi 90.89



Nilai PM SAKIP

Target 75 Realisasi 84.2



Laporan SPIP

Target 4 Realisasi 4



Presentase Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Target 92 Realisasi 133.3



Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Target 75 Realisasi 100



Presentase Penyelesaian Temuan

Target 100 Realisasi 100



Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah

Target 77.5 Realisasi 100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas dan Fungsi.....	1
1.4 Organisasi.....	2
1.6 Sistematika Penyajian	6
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT.....	21
2.4 Postur Anggaran 2023	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian kinerja	24
3.1.1 IKU1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	24
3.1.2 IKU2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah).....	30
3.1.3 IKU3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok).....	37
3.1.4 IKU4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis).....	40
3.1.5 IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	61
3.1.6 IKU6 Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000).....	73
3.1.7 IKM7 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai).....	76
3.1.8 IKM8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	78
3.1.9 IKM9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80
3.1.10 IKM10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	83
3.1.11 IKM11 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	87
3.1.12 IKM12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	90
3.1.13 IKM13 Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	91

3.1.14IKM14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	94
3.1.15 IKM15 Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	95
3.1.16 IKM16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	97
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL) ...	102
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	105
IV. PENUTUP	107
4.1 Kesimpulan.....	107
4.2 Rekomendasi	108
4.3 Tindak Lanjut	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi pegawai BPSPL Makassar.....	4
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.....	18
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023.....	20
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2023.....	22
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW III Tahun 2023	23
Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1	25
Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU 1	30
Tabel 9. Capaian IKU Realisasi IKU 2	31
Tabel 10. KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dilakukan pendampingan	32
Tabel 11. KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar yang sudah ditetapkan.....	33
Tabel 12. Hasil penilaian EVIKA KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar	34
Tabel 13. Realisasi anggaran IKU2	37
Tabel 14. Capaian Realisasi IKU 3	37
Tabel 15. Perbandingan realisasi dan target tahun 2020 s.d. 2024	38
Tabel 16. Realisasi anggaran IKU 3.....	39
Tabel 17. Capaian Realisasi IKU 5	40
Tabel 18. Realisasi Capaian IKU 5	60
Tabel 19. Capaian Realisasi IKU 5	61
Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja IKU 5 dengan Target Jangka Menengah Organisasi	62
Tabel 21. Pelaksanaan BAP Stock di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	68
Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU 5	73
Tabel 23. Capaian Realisasi IKU 8	74
Tabel 24. Capaian Realisasi IKU 9	77
Tabel 25. Capaian Realisasi IKM 10	79
Tabel 26. Capaian Realisasi IKM 9.....	81
Tabel 27. Realisasi Anggaran IKM 11.....	83
Tabel 28. Capaian Realisasi IKM 12.....	85
Tabel 29. Capaian Realisasi IKM 13	88
Tabel 30. Realisasi Anggaran IKM 13.....	90
Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 14	90
Tabel 32. Capaian Realisasi IKM 13	92
Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja IKM15 dengan target jangka menengah organisasi.....	93
Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 14.....	94
Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 17	96
Tabel 36. Capaian Realisasi IKM 16.....	98
Tabel 37. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL.....	102
Tabel 38. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2023 ...	105
Tabel 39. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2023	105
Tabel 40. Tindak lanjut atas rekomendasi TW I Tahun 2023	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.....	2
Gambar 2. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian.....	3
Gambar 3. Grafik Pegawai BPSPL Makassar berdasarkan penempatan wilayah kerja	4
Gambar 4. Visi, Misi, dan Arahan Presiden serta Agenda Perubahan	7
Gambar 5. Misi KKP dan DJPRL	9
Gambar 6. Tujuan KKP dan DJPRL	9
Gambar 7. Misi BPSP Makassar	12
Gambar 8. Tujuan BPSP Makassar	12
Gambar 9. Capaian Kinerja IKU + IKM BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku.....	23
Gambar 10. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar s.d. TW III	27
Gambar 11. Bantuan KOMPAK BPSPL Makassar Tahun 2023.....	39
Gambar 12. Infografis Pendataan dan Survey Biota Laut Dilindungi	42
Gambar 13. Sosialisasi perlindungan jenis ikan oleh enumerator.....	43
Gambar 14. Grafik total pendaratan hiu dan pari di wilayah kerja BPSPL Makassar	46
Gambar 15. Dokumentasi kegiatan enumerator Hiu Paus.....	49
Gambar 16. Survival rate CSC Pulau Bokori	49
Gambar 17. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar	63
Gambar 18. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	64
Gambar 19. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	64
Gambar 20. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	66
Gambar 21. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	67
Gambar 22. Jumlah individu bambu laut berdasarkan hasil survey	72
Gambar 23. Rekapitulasi PNBPN Jenis Ikan di BPSPL Makassar Tahun 2023	75
Gambar 24. Grafik Perbandingan Capaian IKM 13 dari 2019 –2023	93



photo by: M. Rizal B. (BPSPL Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja TW II ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan pengelolaan, meliputi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 65/MEN/2020 Tanggal 28 Desember 2020 perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL). Berkedudukan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut

ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2023.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 Organisasi

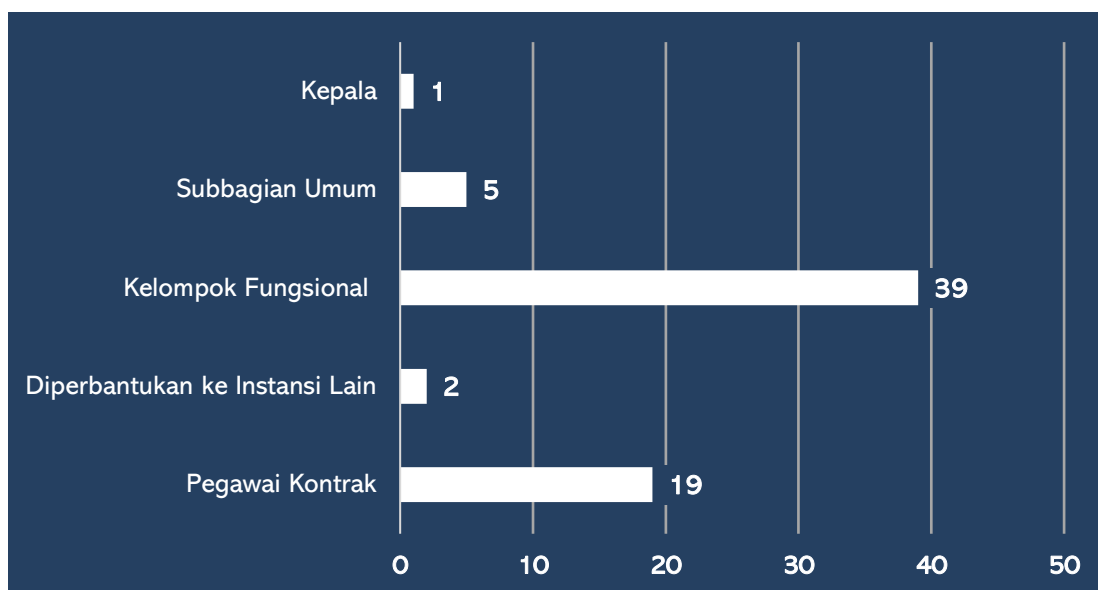
Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon III A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

A. Sub Bagian umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Pranata keuangan APBN dan Penata Laksana Barang yang terdiri dari Pranata keuangan APBN Mahir sebanyak 2 (dua) Orang dan Penata Laksana Barang Terampil sebanyak 1 (satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi didelegasikan kepada perencana yang ada di BPSPL Makassar dan tergabung di kelompok kerja tersendiri

- B. Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional **Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP)** dengan jumlah **26 (Dua Puluh Enam)** orang yang terdiri dari **15 fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 11 fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda, enam Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, tiga Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda serta tiga fungsional umum.**

Berikut ini adalah grafik jumlah Staf BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian:

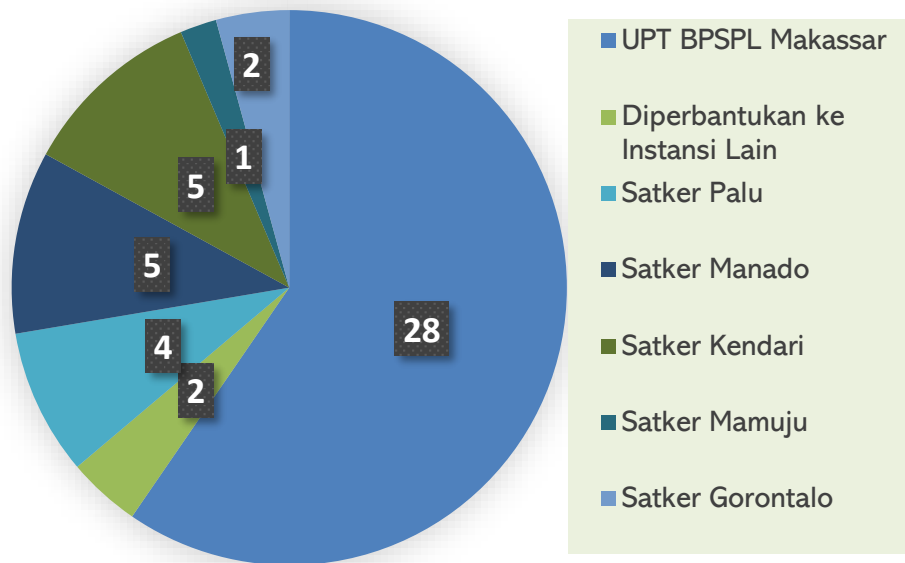


Gambar 2. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2023 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke

Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Berikut ini grafik jumlah staf ASN BPSPL Makassar berdasarkan lokasi penempatan:



Gambar 3. Grafik Pegawai BPSPL Makassar berdasarkan penempatan wilayah kerja

Tabel 1. Komposisi pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan						Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
D3	1	1					2
D4			1	2			3
S1	13	8	1	4			26
S2		1	4	2	8	1	16
Jumlah Total	14	10	6	8	8	1	47

Sampai dengan Tahun 2023 ini jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah **47 (Empat Puluh Tujuh)** orang. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2023 adalah sebanyak **19 (sembilan belas)** orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 5 (lima) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 3. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu

dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNBP.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNBP di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan namun selain sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi diantaranya :

1. Belum semua tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan oleh BPSPL Makassar. Tugas pokok fungsi yang belum bisa dijalankan diantaranya Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya, Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang diturunkan ke BPSPL Makassar terkait pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut.
2. Belum lengkapnya data terkait kepemilikan izin pemanfaatan ruang yang dilengkapi dengan informasi koordinat beserta area yang dimanfaatkan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut menjadi terhambat.
3. Belum adanya staf BPSPL Makassar di semua area yang terdapat pemanfaatan atau pengiriman jenis ikan sehingga verifikasi harus dilakukan secara daring atau meminta bantuan dengan karantina untuk verifikasi langsung. Hal ini rawan menyebabkan penyalahgunaan dokumen.
4. Masih banyak adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunnya potensi PNBP.
5. Aplikasi eSAJI untuk melaksanakan kegiatan pelayanan jenis ikan dilindungi sering mengalami kendala yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pemberian layanan jenis ikan berupa kesalahan dalam perhitungan PNBP atau kuota pemanfaatan jenis ikan dilindungi.
6. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
7. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian bantuan pemerintah bagi kelompok masyarakat penggiat Konservasi diantaranya; kurang memadainya nominal nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh kelompok. Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan peningkatan nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam mendukung kegiatan Konservasi. Evaluasi dan pengembangan bantuan bagi kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan KOMPAK juga harus menjadi perhatian BPSPL Makassar dalam pemberian bantuan selanjutnya. Kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK dengan nilai evaluasi baik selama 2

tahun dapat dipertimbangkan memperoleh bantuan yang dinilai diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan konservasi kawasan dan/atau jenis.

8. Banyak potensi pariwisata di Sulawesi belum terkelola dengan baik dan Akses di beberapa tempat wisata yang berada di pulau cukup jauh dari pusat kota, dan daerah tidak ada akses melalui udara sehingga perlu menempuh perjalanan darat dan laut yang cukup jauh.
9. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan (bendahara, PUMK, dan operator SPM), kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Tahun 2023**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

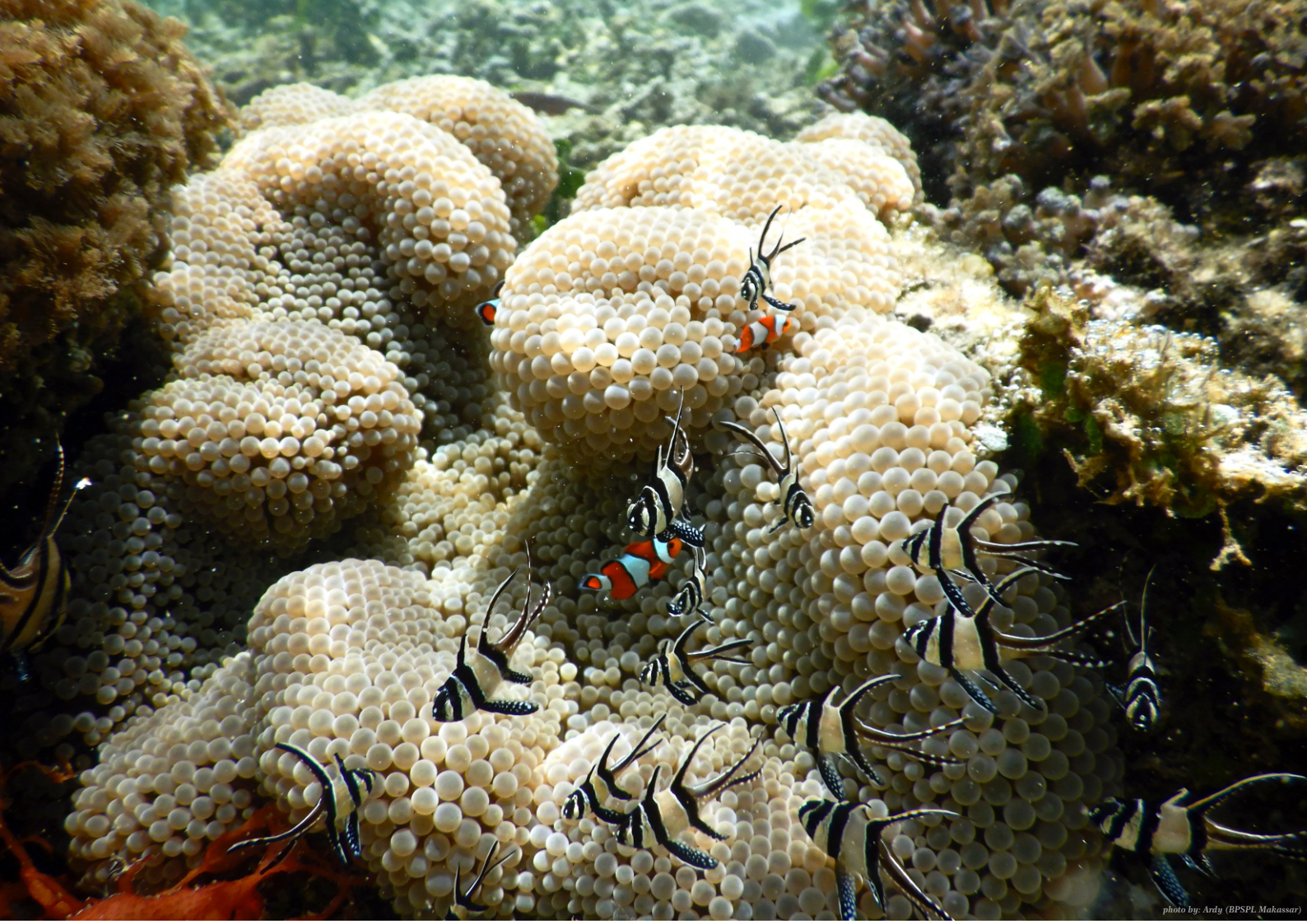
Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2023 dan penetapan kinerja Tahun 2023 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.



BAB II

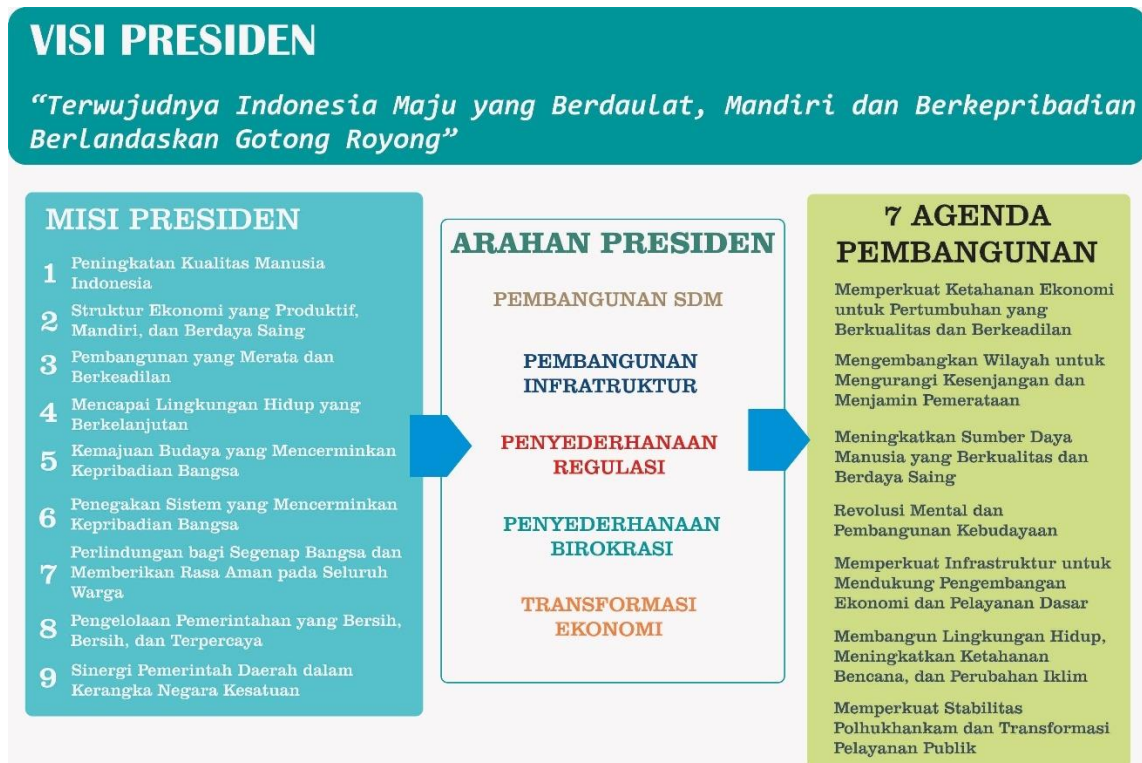
PERENCANAAN KINERJA



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahannya Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada Gambar berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, dan Arahannya Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2020 pda tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPRL 2020 – 2024 adalah **“Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Visi BPSPL Makassar tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian Visi BPSPL Makassar adalah **“Terdepan dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut Wilayah Sulawesi menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi

Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KKP dan Pengembangan Kebijakan KKP;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

Gambar 5. Misi KKP dan DJPRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan KKP dan DJPRL adalah:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional;**
3. **Optimalnya Konservasi dan Pengelolaan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;**
4. Meningkatnya Kinerja RB di KKP

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

Gambar 6. Tujuan KKP dan DJPRL

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP Tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen RPL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan**

- a. Sasaran: "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.
- b. Sasaran: "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 - Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, 15(lima belas) kawasan pada tahun 2020 dan 22 (dua puluh dua) kawasan per tahunnya sampai dengan tahun 2024.
- c. Sasaran: " Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja:
 - Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024.
- d. Sasaran: "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
- e. Sasaran: "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
- f. Sasaran Program:"Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya", dengan Indikator Kinerja:
 - Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5(lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024.
- g. Sasaran: "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- **Program Kualitas Lingkungan Hidup**

- a. Sasaran: “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024.
 - Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024.
- b. Sasaran: “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.
- c. Sasaran: “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”, dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024.
- d. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

- **Program Dukungan Manajemen**

- a. Sasaran: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL”, dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai PMPRB DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
 - Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6(enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
 - Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
 - Nilai PM SAKIP DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
 - Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
 - Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020

menjadi 89 (Baik) pada tahun 2024.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Makassar, maka, ditetapkan Misi BPSPL Makassar sebagai berikut :

MISI BPSPL MAKASSAR

1. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
3. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar
4. Perencanaan Ruang Laut di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar

Gambar 7. Misi BPSPL Makassar

Dalam mewujudkan visi dan misi BPSPL Makassar, BPSPL Makassar merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020 – 2024 sebagai berikut:

TUJUAN BPSPL MAKASSAR

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar
3. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar
4. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Lingkup BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
5. Misi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Makassar dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Makassar

Gambar 8. Tujuan BPSPL Makassar

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Makassar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;

2. Tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Program Kualitas Lingkungan Hidup

3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 3) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 4) meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
4. tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan “meningkatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar”;

Program Dukungan Manajemen

5. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023. Perubahan ini antara lain dihapuskannya Indikator kinerja “Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi” dan dihapuskannya sasaran kegiatan dan indikator kinerja “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar” serta perubahan target pada indikator kinerja PNPB dan IKPA. Adanya perubahan perjanjian kinerja tersebut antara lain karena anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja di atas diblokir sepenuhnya. Untuk target PNPB disesuaikan dengan kondisi banyaknya pelaku usaha IUMK yang terdaftar pada tahun 2023, sedangkan target IKPA mengalami kenaikan karena mandatori dari Biro Keuangan untuk kenaikan IKPA seluruh KKP. Berikut ini adalah perbandingan indikator kinerja tahun 2023 awal dan yang telah direvisi:

PERJANJIAN KINERJA 2023 (REV-0) JANUARI 2023

PERJANJIAN KINERJA 2023 (REV-01) DESEMBER 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	1	2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL	3	3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL	3

		4.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1			Indikator Kinerja dihapus akibat anggaran diblokir		
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6	4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5

6.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	7.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (kawasan)	2		Sasaran Kegiatan dihapus akibat anggaran diblokir	Indikator Kinerja dihapus akibat anggaran diblokir		
7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	8.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	991.212	7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	6.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	675.000
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	89	8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.75
		10.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82			8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75			9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85			10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75			11.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4			12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92			13.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75			14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	100			15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77,5			16.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77,5

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat tambahan satu sasaran kegiatan pada Tahun 2023. Sasaran kegiatan yang menjadi tambahan adalah “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran”. Namun sasaran ini dihapus karena anggaran untuk indikator kinerja ini diblokir seluruhnya, sehingga sasaran kegiatan tahun 2022 sama dengan tahun 2023. Berikut ini adalah perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dengan Sasaran Kegiatan Tahun 2023:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

SASARAN KEGIATAN 2022		SASARAN KEGIATAN 2023	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
6	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	6	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar

Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023	
1	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Rekomendasi Kebijakan)	1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2022		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023	
3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
6	Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.)	6	Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.)
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)
15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023 ditetapkan pada Tanggal 9 Januari 2023. Pada perjanjian kinerja Tahun 2023 terdapat **18 Indikator Kinerja** yang terdiri dari sembilan (9) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sembilan (9) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2022 terdapat dua Indikator

Kinerja tambahan pada Tahun 2023. Kedua Indikator Kinerja tambahan ini adalah “IKU 4 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru” dan “IKU 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar”. Namun kegiatan pada kedua Indikator kinerja tambahan ini mengalami pemblokiran pada IKU 4 dan Blokir ABT pada IKU 7 sehingga dilakukan revisi perjanjian kinerja yang menyebabkan kedua indikator kinerja tersebut dihapus pada Bulan November 2023. Berikut ini adalah perjanjian kinerja akhir BPSPL Makassar Tahun 2023:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
6.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	6.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	675.000

7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.75
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85
		11.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		13.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		16.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77,5

2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 10 Sasaran Program, dan 29 Indikator Kinerja. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2023 terdiri dari Tiga Program, Delapan Sasaran Kegiatan, dan 18 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara

langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti nilai PNBPN, Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi dan dilestarikan, dan IP ASN serta unit kerja berpredikat menuju WBK.

2.4 Postur Anggaran 2023

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2023, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp. 15.535.785.000,-** (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 13.455.785.000,-** (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni** dan **Rp. 2.080.000.000,-** (Dua Milyar Delapan Puluh Juta RUPIAH) dari **PNBP**. Dari Pagu anggaran di atas terdapat blokir anggaran sebesar Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Namun anggaran blokir ini tidak bisa dihilangkan dari PAGU. Blokir ini terdapat di program perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Berikut ini adalah tabel postur anggaran BPSPL Makassar Tahun 2023.

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2023

Kegiatan	PAGU TOTAL	BIOKIR
Perencanaan Ruang Laut	1.808.000.000	-
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.872.000.000	125.000.000
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	50.000.000	-
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	10.805.785.000	-
TOTAL	15.535.785.000	125.000.000



BAB III

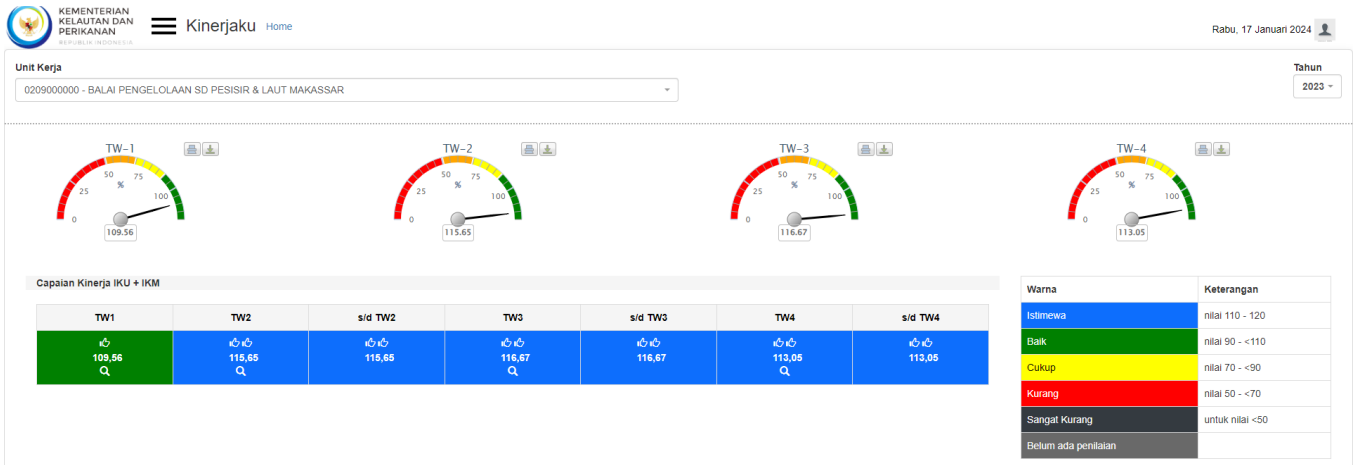
AKUNTABILITAS

KINERJA



III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang menjadi target BPSPL Makassar telah tercapai realisasinya. Pada tahun 2023 terdapat enam (6) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) di Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar. Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023 mencapai predikat Istimewa dengan capaian Nilai IKU + IKM **113.05**



Gambar 9. Capaian Kinerja IKU + IKM BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW III Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	%
1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	3	100
2 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL	1	2	120
3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3	3	100
4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6	10	120

5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	10	120
6	Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.000)	675.000	882.681,302	120
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.75	95.35	101.71
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82	88.69	108.16
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	75	87.41	116.55
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85	90.89	106.91
11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75	84.2	112.27
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	4	100
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92	133.3	120
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	100	120
15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	100	100	100
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77.5	100	120

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan. Dokumen yang menjadi output sebagai capaian dalam Indikator Kinerja ini adalah Laporan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, Laporan Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut, dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang

terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1

SS - 1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
	3	3	100	-	3	100		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU 1 sudah memenuhi target dan IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena telah mengalami perubahan target dan satuan capaian. Tiga dokumen capaian ini adalah dokumen sosialisasi, verifikasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 1 ini merupakan IKU yang baru ada di target kinerja BPSPL Makassar tahun 2023. Pada Tahun 2022 output pada IKU ini adalah satu rekomendasi kebijakan sedangkan pada tahun ini tiga dokumen. Sehingga realisasi kinerja IKU ini **tidak dapat dibandingkan** dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

IKU 1 ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan target jangka menengah organisasi atau renstra, karena IKU ini belum terdapat di jangka menengah organisasi atau Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya sudah terdapat basis data identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar, sudah terdapat prasarana seperti GPS geodetic dan drone yang dapat mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan maupun verifikasi teknis, dan baiknya koordinasi antar instansi baik dari pusat maupun PSDKP di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor yang dapat menjadi penghambat atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya adalah lamanya delegasi dari pusat terkait pelaku usaha yang prioritas untuk dilaksanakan monitoring KKPRL.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pelaksanaan sosialisasi secara *hybrid* (daring dan luring) dapat mengoptimalkan penyampaian informasi yang lebih detail serta jangkauan informasi yang lebih luas untuk peserta yang tidak dapat hadir secara luring dengan penggunaan

biaya yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pelaksanaan secara luring saja. Pelaksanaan verifikasi teknis secara daring melalui aplikasi zoom juga memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Pelaksanaan verifikasi teknis secara langsung ke lapangan hanya akan dilakukan apabila terdapat kondisi yang dirasa perlu seperti kurangnya kelengkapan administrasi saat dilakukan verifikasi teknis secara daring.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dibagi memiliki dua produk hukum, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan kepada kegiatan berusaha dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKPRL) yang diberikan kepada kegiatan non berusaha seperti pemerintah dan pemanfaatan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja IKU1 pada Tahun 2023 antara lain: Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Verifikasi/ Penilaian Teknis Pemanfaatan Ruang Laut..

Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan sosialisasi pemanfaatan ruang laut telah diselenggarakan oleh BPSPL Makassar di Kota Gorontalo pada TW I. Sedangkan pada TW II juga telah dilaksanakan sosialisasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 12 Juni 2023. Pada kegiatan sosialisasi ini BPSPL Makassar mendampingi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut untuk melakukan sosialisasi tentang perizinan PKKPRL kepada pelaku usaha pertambangan nikel dan smelter di Kab. Morowali.

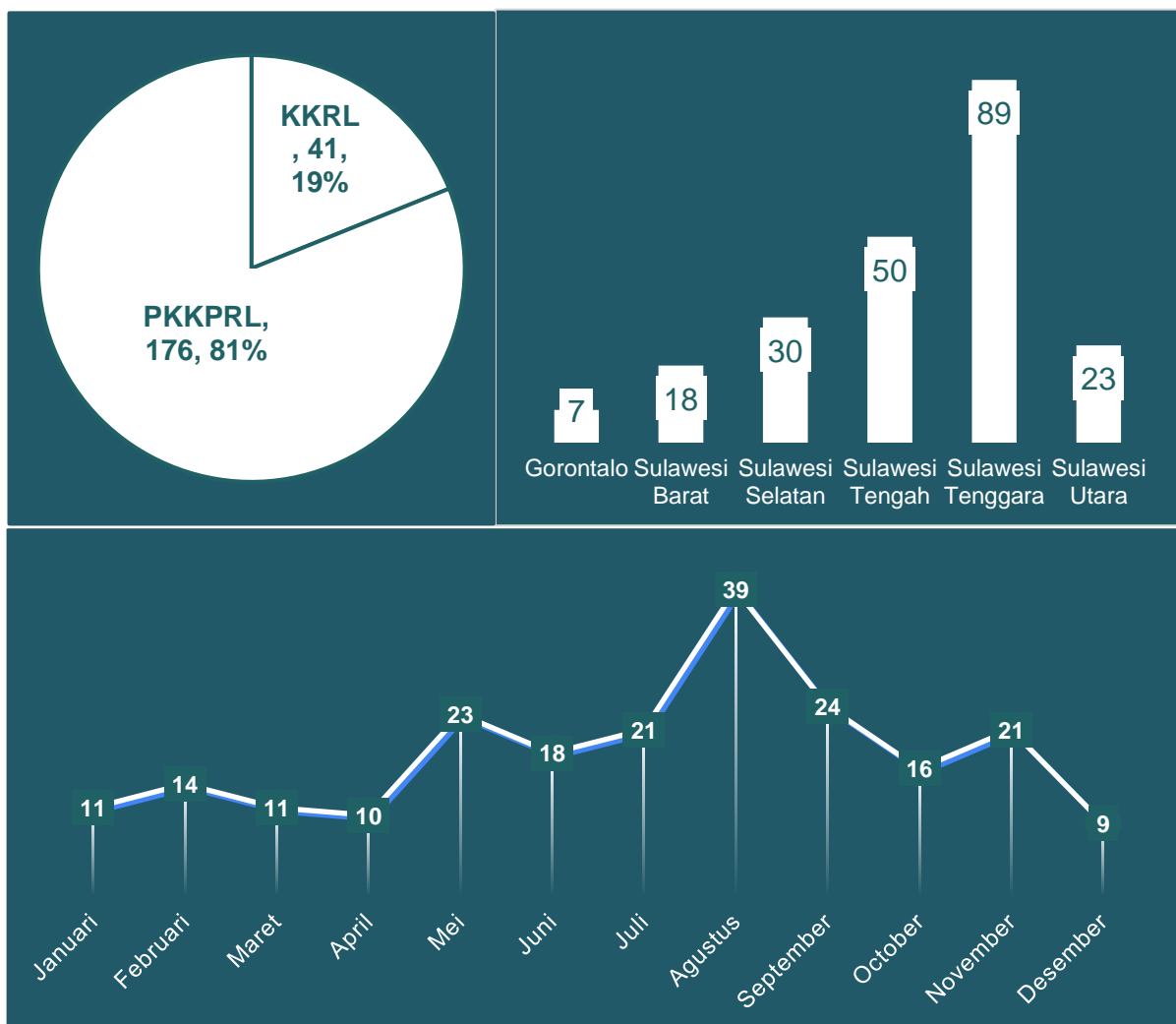
Pada Triwulan III BPSPL Makassar melakukan sosialisasi ke Dinas Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 29 September 2023. Selain pelaksanaan sosialisasi di atas, BPSPL Makassar juga melakukan sosialisasi dengan membuka gerai pelayanan PKKPRL yang telah dilakukan di Makassar pada tanggal 7 - 8 September. Pada pelayanan gerai ini setidaknya lebih dari 20 pelaku usaha yang melakukan konsultasi dan ada juga yang didampingi pengajuan izin KKPRL hingga selesai proses permohonan di OSS. Karena dinilai efektif sebagai bentuk pemberian pelayanan perizinan KKPRL.

Pada triwulan IV telah dilaksanakan juga sosialisasi KKPRL di Kota Palu pada 5 Oktober 2023. Selain pemberian materi mengenai KKPRL juga diberikan materi mengenai Permohonan KKPRL dalam Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan (Reklamasi, Sedimentasi Laut, dan Pemanfaatan ALSE (Air Laut Selain Energi)).

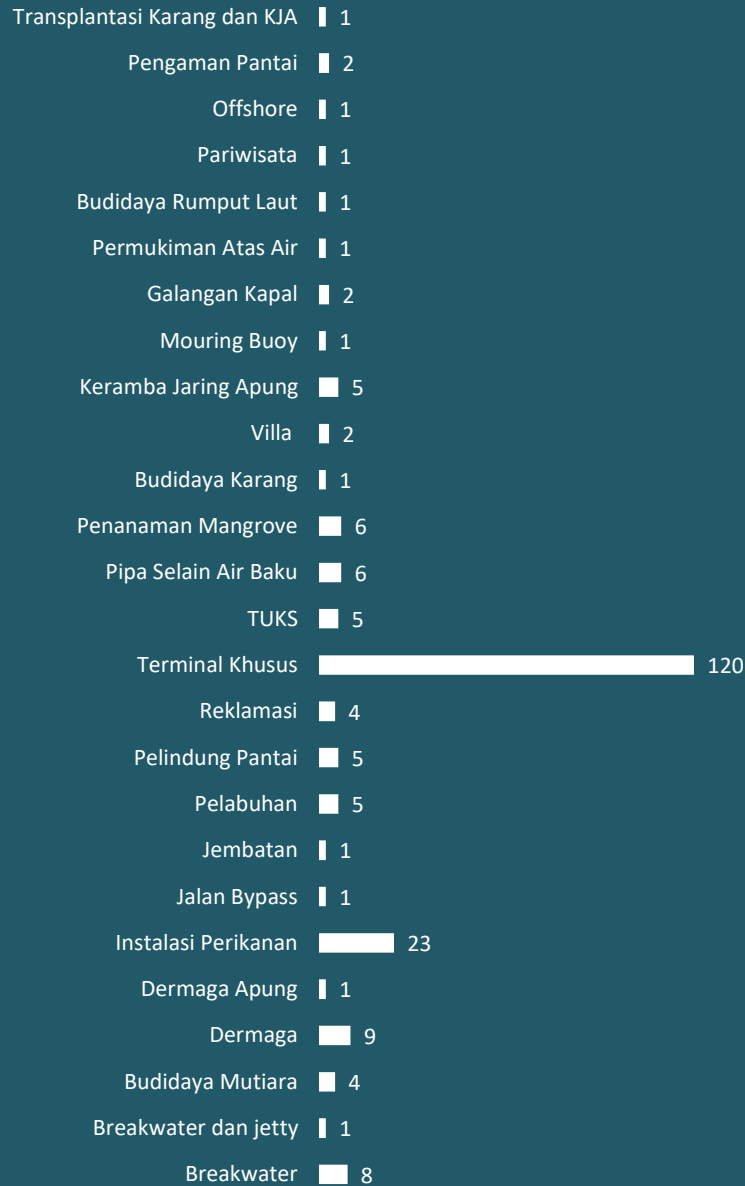


Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut

Proses pemberian PKKPRL melalui tahapan pendaftaran pada sistem OSS, pemeriksaan dokumen, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan verifikasi teknis dan verifikasi lapangan, pembayaran PNPB oleh pemohon, dan proses penerbitan PKKPRL. Sedangkan proses pemberian KKRL melalui tahapan pendaftaran pada sistem Si-HANDAL, pemeriksaan dokumen, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan verifikasi teknis dan verifikasi lapangan, serta proses penerbitan KKRL. Pelaksanaan Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui tim penilai teknis yang dilaksanakan di pusat dan penilaian teknis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui penugasan oleh pusat. Selama tahun 2023, total 217 penilaian teknis yang telah dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Makassar. Berikut ini adalah verifikasi/ penilaian teknis yang dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 10. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar s.d. TW III
Total **217** verifikasi teknis ini merupakan jumlah total dari pelaksanaan oleh pusat dan oleh UPT dengan pendelegasian pusat. Berdasarkan jenis kategori perizinan, **81% atau 176 dari total 217 perizinan adalah perizinan berusaha (KKPRL)** sedangkan sisanya adalah KKRL. Jumlah verifikasi teknis paling banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 89, sedangkan berdasarkan bulan pelaksanaan verifikasi teknis paling banyak terdapat di Bulan Agustus sebanyak 39 kali.



Selama tahun 2023, penilaian teknis dilakukan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan yang paling banyak berupa pemanfaatan terminal khusus sebanyak 120 penilaian teknis atau lebih dari 55% dari total jumlah penilaian teknis. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan lain.

Dari total 217 penilaian teknis, penialain teknis yang dilaksanakan BPSPL Makassar berdasarakan pendelegasian pusat sebanyak 41 permohonan dengan jenis permohonan PKKPRL sebanyak 29 permohonan dan KKRL sebanyak 12 permohonan dengan jenis pemanfaatan paling banyak yaitu instalasi perikanan 18 kali.

Setelah dilakukan verifikasi / penialain teknis, tindak lanjut yang dilakukan antara lain

yaitu verifikasi lapang. Verifikasi lapang dilakukan apabila dalam penilaian teknis ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan dan hasil penilaian teknis oleh verifikator. Pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian lapang sebanyak 23 kali.



Verifikasi Lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kegiatan verifikasi permohonan kesesuaian ruang laut. Kegiatan ini dilakukan atas hasil penilaian teknis oleh pusat maupun penilaian teknis yang dilakukan oleh BPSPL Makassar

Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut



Monitoring pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi, agar pemegang izin menaati RTR yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana RTR dan/atau rencana zonasi, dan Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan dan/atau setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan.

Metodologi dalam pelaksanaan monitoring

KKPRL ini adalah dengan observasi langsung survei lapangan dan wawancara beserta pengisian kuisioner. Pada tahun 2023, BPSPL Makassar telah melakukan monitoring KKPRL terhadap 10 pemegang izin KKPRL di wilayah BPSPL Makassar yang izinnya telah terbit di tahun 2022 sebagai berikut:

No	Subjek Hukum	Kegiatan	Lokasi	Hasil Monitoring
1	PT Biomasa Jaya Abadi	Terminal Khusus	Kab. Pohowato, Gorontalo	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
2	DKP Kab. Wakatobi	Dermaga SPBT Numana	Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
3	Dinas PUPR Kab. Wakatobi	Penataan Kawasan Waterfront City Marina	Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
4	BWS Sulawesi III - Palu	Rehab Tanggul Pengaman Pantai	Kota Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
5	KSOP	Pelabuhan Pantoloan	Kota Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
6	DJPKRL - DIT P4K	Tambat Labuh/ Dermaga Apung	Pulau Papan, Kab. Tojo una una, Suawesi Tengah	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
7	DJPKRL - DIT P4K	Tambat Labuh/ Dermaga Apung	Kab. Bitung, Sulawesi Utara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
8	DJPT PPS Bitung	Pengembangan PPS Bitung	Kab. Bitung, Sulawesi Utara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
9	DJPT KKP	Pengembangan PPS Kendari	Kab. Minahasa, Sulawesi Utara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan
10	DJPT - PPS Kendari	Pengembangan PPS Kendari	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Pemanfaatan Sesuai Peruntukan

Berdasarkan hasil monitoring KKPRL di atas, pemanfaatan secara umum telah sesuai dengan peruntukan. Namun terdapat kendala yaitu para pemilik izin belum paham mekanisme pelaporan yang harus dipenuhi.

Selain tiga kegiatan yang mendukung IKU di atas, BPSPL Makassar juga dilaksanakan



kegiatan **peningkatan kompetensi SDM verifikasi pemanfaatan ruang laut**. Peningkatan kompetensi SDM meliputi pelatihan pemetaan dan informasi ruang laut berbasis sistem informasi georadar, pemahaman terhadap data kondisi terkini ekosistem (terumbu karang, lamun, dan mangrove), data hidroceanografi dan pengantar bangunan dan

instalasi laut, serta studi kasus penilaian teknis/ monitoring KKPRL.

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU1 tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.808.000.000**, yang berasal dari sumber anggaran RM dan PNPB. Anggaran PNPB baru diberikan di Bulan September, Realisasi anggaran mencapai 99.89%. untuk detail realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU 1

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	343.307.000	343.046.773	99.92
2	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	315.282.000	314.169.180	99.65
3	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	1.026.411.000	1.026.346.514	99.99
4	Peningkatan Kompetensi SDM Petugas Penyelenggara Penataan Ruang Laut	123.000.000	122.484.903	99.58
JUMLAH		1.808.000.000	1.806.047.370	99.89

* : Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 450.000.000 dengan Rp. 335.700.00 pada komponen kegiatan verifikasi dan sebesar Rp. 114.300.000 pada komponen Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU1 pada Triwulan I Tahun 2024 adalah Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Manado dan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut terhadap permohonan KKPRL yang masuk.

3.1.2 IKU2 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan

percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 9. Capaian IKU Realisasi IKU 2

SS - 2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
2	1	2	200 atau 120 (kinerjaku)	0	1	200 atau 120 (kinerjaku)		

Berdasarkan tabel di atas realisasi dari IKU ini sudah melebihi target dimana dari satu target yang ditetapkan telah terealisasi dua daerah. Jumlah ini sama dengan capaian tahun 2022. Persentase capaian sebenarnya IKU ini adalah 200% namun capaian kinerja maksimal pada aplikasi kinerjaku adalah 120%. Daerah yang menjadi capaian di IKU ini adalah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 2 ini merupakan IKU yang sudah ada di Tahun 2022, apabila realisasinya dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sama dengan capaian dua daerah. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya karena terdapat perubahan target dari hektar ke daerah.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

IKU 2 ini merupakan IKU yang sudah ada di Tahun 2022, Namun karena IKU ini belum terdapat di rencana strategis organisasi maka realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam capaian IKU2 dikarenakan baiknya koordinasi antara BPSPL Makassar dengan DKP Provinsi yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar, Akademisi, praktisi konservasi, dan tim penyusun materi teknis perairan RZWP3K Integrasi. Hal ini memudahkan dalam pencapaian progress capaian IKU2.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan IKU 2 pada TW III ini adalah pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara untuk kegiatan terkait KKD Minahasa Utara dan Sitaro. Koordinasi ini dilakukan secara langsung di kantor BPSPL Makassar Wilker Manado sehingga penggunaan sumber daya menjadi efisien

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BPSPL Makassar melakukan pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi di empat provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah pendampingan KKD di wilayah Sulawesi:

Tabel 10. KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dilakukan pendampingan

Provinsi	Nama Kawasan	Jenis
Sulawesi Utara	KKD Bitung	Taman
Gorontalo	KKD Teluk Gorontalo	Taman
	KKD Pulau Monduli	Taman
	KKD Pulau Olinggobe	Taman
	KKD Pulau Mabasas-Maruangi	Taman
	KKD Pulau Dulangka	Taman
Sulawesi Tenggara	KKD Kolaka Utara	Taman
	KKD Kolaka	Taman
Sulawesi Selatan	KKD Pulau Panikiang	Taman
	KKD Pulau Kauna-Kayuadi	Taman
	KKD Pulau Pasi Gusung	Taman

Rekapitulasi kegiatan yang dilakukan oleh BPSPL Makassar untuk mendukung IKU ini antara lain:

- ❖ Proses pengusulan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yaitu [Kawasan Konservasi Daerah Pulau Pannikiang](#), [Kawasan konservasi Daerah Pasi Gusung](#) dan [Kawasan Konservasi Daerah Kayuna kayuadi](#) telah selesai dengan adanya surat usulan penetapan kawasan konservasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2884/DKP tanggal 09 Maret 2023.
- ❖ Untuk proses penetapan Kawasan Konservasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu [Kawasan Konservasi Daerah Taman Wisata Perairan Bitung](#) dengan luas 9.666,45 Ha masih akan dilanjutkan dengan [evaluasi dokumen final dan konsultasi publik](#).
- ❖ Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan [Surat Keputusan tentang Kawasan Konservasi di Wilayah perairan Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo](#) pada bulan Juli Nomor 127 Tahun 2023, [Surat Keputusan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Minahasa Utara](#) Nomor 128 Tahun 2023 dan [Surat Keputusan Kawasan Konservasi di wilayah perairan Siau Tagulandang](#) Nomor 129 Tahun 2023 pada bulan Juli tahun 2023 dan selanjutnya akan dilakukan [Sosialisasi internal dan penyusunan SUOP](#).
- ❖ Kegiatan [Konsultasi Publik dan FGD](#) dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Pulau Monduli dan Perairan Sekitarnya di Kab. Boalemo dengan Luas 7.380,61 Ha dan [Kawasan Konservasi Daerah Pulau Olinggobe, Pulau Mabasas-Maruangi, dan Pulau Dulangka](#) di Kab. Pohuwato dengan luas 8.585,68 Ha di Provinsi Gorontalo.
- ❖ Untuk penetapan [Kawasan Konservasi bagian Utara Sulawesi Utara](#) dengan luas 603.511,30 Ha hingga saat ini sudah dilakukan [evaluasi teknis dan reviu](#)

draft SK dan sudah berada di Biro Hukum Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia.

Tabel 11. KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar yang sudah ditetapkan

No	Provinsi	Luas KKD (ha)	KKD Ditetapkan (ha)	Keterangan
1	Sulawesi Utara	244.553,37	244.553,37	
	- KKD Tatoereng	164.251,94	164.251,94	Ditetapkan 2019
	- KKD Minahasa Utara	26.524,87	26.524,87	Ditetapkan 2023
	- KKD Sitaro	44.110,11	44.110,11	Ditetapkan 2023
	- KKD TWP Lembeh Bitung	9.666,45		
2	Gorontalo	159.124,6	159.124,6	
	- KKD Teluk Gorontalo	76.580,48	76.580,48	Ditetapkan
	- KKD Gorontalo Utara	43.759,62		
	- KKD Monduli	7.385,04		
	- KKD Dulangka	3.417,51		
	- KKD Olinggobe	2.984,09		
	- KKD Maruagi Mabasasar	8.584,84		
	- KKD Tolingula	2.095,29		
	- KKD Sumalata	14.317,73		
3	Sulawesi Tengah	1.338.291,83	1.338.291,83	
	- KKD Doboto	60.042,72	60.042,72	Ditetapkan 2017
	- KKD Parigi Moutong	128.689,86	128.689,86	Ditetapkan 2017
	- KKD Morowali	292.910,12	292.910,12	Ditetapkan 2017
	- KKD Banggai Dalaka	856.649,13	856.649,13	Ditetapkan 2017
4	Sulawesi Barat	254.027,51	184.469,31	
	- KKD Kep. Balabalakang	184.469,31	184.469,31	Ditetapkan 2022
	- KKD Wilayah Pesisir Kab. Majene	2.385,71		
	- KKD Kabupaten Polewali Mandar	172,49		
	- KKD Kabupaten Mamuju	67.000		
5	Sulawesi Tenggara	455.056,63	48.947,33	
	- KKD Teluk Moramo	21.902,34	21.902,34	Ditetapkan 2021
	- KKD Pulau Wawoni	27.044,99	27.044,99	Ditetapkan 2021
	- KKD Selat Tiworo	25.543,7		
	- KKD Kolaka Utara	37.365,2		
	- KKD Kolaka	54.919,7		
	- KKD Buton Tengah	124.098,5		
	- KKD Muna	84.222,5		
	- KKD Buton Selatan	28.145		
	- KKD Buton	1.154,1		
	- KKD Bombana	50.660,6		
6	Sulawesi Selatan	849.905,48	569.269,57	
	- KKD Liukang Tangaya	508.534,3	508.534,3	Ditetapkan 2022

- KKD Liukang Tupabbiring	63.582,49	63.582,49	Ditetapkan 2022 Proses Proses Proses
- KKD Pulau Panikiang	496,8		
- KKD Kayuadi	6.899,43		
- KKD Pasi Gusung	1.769,73		
- KKD Lanjukung	1.659,99		
- KKD Teluk Bone	238.093,55		
- KKD Pulau Sembilan	13.190,15		
- KKD Kepulauan Tanakeke	11.372,6		
- KKD Biongka	1.212,28		
- KKD Tanalilli	1.510,53		
- KKD Malili	1.583,63		
TOTAL	3.300.959,42	2.447.272,92	

Selain kegiatan utama pada IKU ini yaitu fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi, BPSPL Makassar juga melakukan **pendampingan untuk penilaian efektivitas kawasan konservasi (EVIKA)**. Hasil penilaian evika di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil penilaian EVIKA KKD di wilayah kerja BPSPL Makassar

No	Provinsi	Hasil Penilaian (%)	Keterangan
1	Sulawesi Utara		
-	KKD Tatoareng	66,64	Dikelola Optimum
2	Sulawesi Tengah		
-	KKD Doboto	48,91	Dikelola Minimum
-	KKD Parigi Moutong	51,41	Dikelola Optimum
-	KKD Morowali	41,33	Dikelola Minimum
-	KKD Banggai Dalaka	64,48	Dikelola Optimum
3	Sulawesi Barat		
-	KKD Kep. Balabakalang	27,68	Dikelola Minimum
4	Sulawesi Tenggara		
-	KKD Teluk Moramo	43,99	Dikelola Minimum
-	KKD Pulau Wawonii	32,61	Dikelola Minimum
5	Sulawesi Selatan		
-	KKD Liukang Tangaya	21,67	Dikelola Minimum
-	KKD Liukang Tupabbiring	27,98	Dikelola Minimum

KKP3K Perairan Tatoareng Provinsi Sulawesi Utara

Pada tanggal 11 Agustus 2023 telah dilaksanakan penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Daerah di wilayah Sulawesi Utara yang meliputi KKP3K Tatoareng. Tim penilai terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Budi Wiryawan, M.Sc; Tasrif Wijaya S.Pi, M.Si dan Makmur, S.Pi. Hasil penilaian EVIKA yang diperoleh adalah 66,64% dengan kriteria pengelolaan dikelola Optimum (Perak) dengan rincian untuk skor penilaian Kriteria Input (64,7%), skor penilaian Kriteria Proses 75,6%, skor penilaian Kriteria Output (57,7%), dan skor penilaian Kriteria Outcome 64%.

KKP3K Banggai Dalaka, KKP3K Teluk Tomini, KKP3K Doboto, dan KKP3K Morowali dan Morowali Utara



Pada tanggal 7-8 September 2023 telah dilaksanakan penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Daerah di wilayah Sulawesi Tengah yang meliputi KKP3K Banggai Dalaka, KKP3K Teluk Tomini, KKP3K Doboto, dan KKP3K Morowali dan Morowali Utara. Tim penilai terdiri dari: Kusdiantoro - Sekretaris Ditjen PRL, Anita Setianingsih - Perencana Ahli Muda Setditjen PRL, Andreas A Hutahean - Kemenkomarves, dan R. Stevanus Bayu Mangkurat - Kemenkomarves, serta tim sekretariat diwaliki oleh Reky Pramudia.

Berikut adalah penilaian Evika untuk keempat Kawasan Konservasi. Penilaian pertama dilakukan terhadap

KKP3K Banggai Dalaka. Hasil yang diperoleh dari proses penilaian adalah 68,48% dengan kriteria pengelolaan dikelola Optimum (Perak) dengan rincian untuk skor penilaian Kriteria Input 75%), skor penilaian Kriteria Proses 94%, skor penilaian Kriteria Output 52%), dan skor penilaian Kriteria Outcome 25%. Nilai ini meningkat 13,26% dari tahun sebelumnya yaitu 55,22%. Peningkatan penilaian ini dikarenakan telah dilakukannya pengawasan hampir di seluruh area kawasan konservasi secara rutin dengan dibantu oleh mitra kawasan konservasi serta telah tersedianya data time series kondisi biofisik dan sosial ekonomi di wilayah Kawasan Konservasi Banggai Dalaka dengan keterlibatan mitra jejaring termasuk BPSPL Makassar.

Hasil penilaian untuk KKP3K Teluk Tomini sebesar 51,41% dengan kriteria pengelolaan dikelola Optimum (Perak) dengan rincian untuk skor penilaian Kriteria Input 61%), skor penilaian Kriteria Proses 64%, skor penilaian Kriteria Output 45%), dan skor penilaian Kriteria Outcome 13%. Nilai ini meningkat 12,53% dari tahun sebelumnya yaitu 38,88%. Peningkatan penilaian dari kriteria dikelola minimum ke dikelola optimum dikarenakan telah tersedianya data series untuk beberapa jenis target konservasi dan telah dilakukannya pengawasan secara rutin di sebagian besar wilayah kawasan konservasi.

Hasil penilaian untuk KKP3K Morowali dan Morowali Utara sebesar 41,33% dengan kriteria pengelolaan dikelola Minimum (Perunggu) dengan rincian untuk skor penilaian Kriteria Input 54%), skor penilaian Kriteria Proses 47%, skor penilaian Kriteria Output 36%), dan skor penilaian Kriteria Outcome 17%. Nilai ini hanya meningkat 4,4% dari tahun sebelumnya yaitu 36,93%. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan dari penilaian terhadap KKP3K Morowali dan Morowali Utara dikarenakan belum terdapat sarana dan prasarana perkantoran, belum adanya kemitraan yang dijalin dalam pengelolaan kawasan konservasi serta kurangnya sosialisasi/penyadartahuan terkait kawasan dan target konservasi kepada masyarakat sekitar.

Hasil penilaian untuk KKP3K Doboto sebesar 48,91% dengan kriteria pengelolaan dikelola Minimum (Perunggu) dengan rincian untuk skor penilaian Kriteria Input 66%), skor penilaian Kriteria Proses 55%, skor penilaian Kriteria Output 45%), dan skor penilaian Kriteria Outcome 13%. Nilai ini hanya meningkat 4,31% dari tahun

sebelumnya yaitu 44,60%. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan dari penilaian terhadap KKP3K Doboto dikarenakan belum dilakukan pendataan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, belum adanya kemitraan yang dibuktikan dengan dokumen PKS, belum adanya SOP/aturan terkait izin berkegiatan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta belum adanya data kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

KKP3K Balabalakang di Provinsi Sulawesi Selatan



Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2023 di Hotel Harper, Makassar. Pihak yang Terlibat adalah Direktorat KKHL, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Provinsi Sulawesi Barat, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang Wilker Kapoposang, UNHAS / MPRG, CDK Pangkep, YRC, YEKHALI dan Sulawesi Community Fisheries selaku mitra.

Hasil penilaian yang diperoleh yaitu KKD Balabalakang adalah 27,68 (status Dikelola minimum); Nilai dari KK daerah ini cukup rendah karena baru setahun sejak ditetapkan sehingga masih minim dari segi pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian ini berlangsung bersamaan dengan penilaian **KKP3K Liukang Tangayya dan Liukang Tuppabiring**. Hasil penilaian yang diperoleh yaitu TWP Kapoposang 85,27 (status emas/dikelola secara berkelanjutan); KKD Liukang Tangayya adalah 21,67 (status Dikelola minimum) dan KKD Liukang Tupabbiring mencapai 27,98 (status Dikelola minimum). Nilai kedua KK daerah ini cukup rendah karena baru setahun sejak ditetapkan sehingga masih minim dari segi pengelolaan kawasan konservasi.

KKP3K Teluk Moramo dan KKP3K Wawonii di Provinsi Sulawesi Tenggara

Penilaian dilakukan secara Online pada tanggal 22 Agustus 2023, dimana Tim penilai terdiri dari : Enggar Sadtopo, Direktorat Jasa Kelautan, DJPRL, KKP, Defy Nataniel Pada, Yayasan Konservasi Indonesia dan Mohamad Iqbal, USAID Kolektif.

Kawasan Teluk Moramo diperoleh hasil sementara 43,99 dimana berarti status Kawasan dikelola secara minimum. Hasil ini naik dari penilaian pada tahun 2022 yang hanya memperoleh nilai 39,04. Nilai ini rendah karena DKP provinsi Sultra dalam mengupload alat verifikasi sebagai data dukung dan bukti pengelolaan banyak yang belum ada atau tidak sesuai dengan kriteria dan indikator penilaian yang sudah ditetapkan, selain itu menurut tim penilai Laporan yang di upload masih berupa data mentah dalam file excel bukan merupakan laporan atau data yang sudah di olah.

Untuk Kawasan Pulau Wawonii hasil sementara 32,61 dimana berarti status kawasan dikelola secara minimum. Hasil ini naik dari penilaian pada tahun 2022 yang hanya memperoleh nilai 30,50. Hal ini sama dengan kawasan Teluk Moramo karena DKP provinsi Sultra dalam mengupload alat verifikasi sebagai data dukung dan bukti pengelolaan banyak yang belum ada atau tidak sesuai dengan kriteria dan indikator penilaian yang sudah ditetapkan

G. Anggaran

Tabel 13. Realisasi anggaran IKU2

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	100.000.000	61.848.512	61.85
JUMLAH		100.000.000	61.848.512	61.85

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian IKU2 tahun 2023 adalah **Rp. 100.000.000**, sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 61.848.512** atau **61.85%**.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dengan DKP di wilayah kerja BPSPL Makassar terkait pengusulan penetapan KKPD di tahun 2024.

3.1.3 IKU3 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi yang menerima Bantuan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan Keanekaragaman Hayati Laut secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja ini akan diketahui dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut serta pelaksanaan monev pemanfaatan bantuannya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 14. Capaian Realisasi IKU 3

Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
3	3	3	100	0	3	100	4	75

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU ini adalah 100% dengan capaian tiga kelompok dari target tiga kelompok. Capaian ini sama dengan capaian pada periode sebelumnya dan 75% dari target Renstra 2024 yaitu empat kelompok.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 3 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian yang sama di Tahun 2022 adalah sama 100% dengan realisasi tiga kelompok.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU 3 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis nasional telah mencapai 20% (3 kelompok) dari target kumulatif jangka menengah organisasi yaitu 15 kelompok, sedangkan realisasi kumulatif adalah 11 (73.33%) dari target kumulatif s.d. 2024 (15 kelompok) sesuai dengan rincian tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan realisasi dan target tahun 2020 s.d. 2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1	4	4	3	3	3	3	4 (kumulatif 15)	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU3 antara lain adalah koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan KKKHL, Pemerintah Daerah dan juga dengan kelompok calon penerima bantuan. Selain itu, baiknya koordinasi antara pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penanggungjawab kegiatan juga memudahkan dalam proses pengadaan barang bantuan KOMPAK sehingga capaian IKU ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan IKU 3 ini antara lain pelaksanaan survey Harga Pokok Satuan (HPS) barang-barang bantuan dengan menggunakan e-katalog dan komunikasi secara langsung dengan calon penyedia yang pada tahun sebelumnya sudah menjadi penyedia bantuan kompak menyebabkan efisiensi penggunaan anggaran karena tidak membutuhkan banyak anggaran untuk terlaksanakannya survey HPS ini.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian IKU ini pada tahun 2023 adalah telah dilaksanakannya serah terima bantuan KOMPAK untuk tiga

kelompok. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok di atas berupa alat penunjang kegiatan konservasi, baik itu konservasi terumbu karang atau konservasi penyu. Berikut adalah infografis bantuan KOMPAK Tahun 2023 yang berisi informasi alat-alat bantuan beserta nilai total bantuan untuk tiap-tiap kelompok.



Gambar 11. Bantuan KOMPAK BPSPL Makassar Tahun 2023

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU3 tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 400.000.000**. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM). Untuk detail realisasinya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 16. Realisasi anggaran IKU 3

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pemberian bantuan KOMPAK	380,691,000	380,593,550	99.97
2	Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK	19,309,000	19,231,691	99.6
JUMLAH		400.000.000	399,825,241	99.96

H. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan I 2024 adalah mengidentifikasi dan memverifikasi kelompok calon penerima bantuan KOMPAK tahun 2024.

3.1.4 IKU4 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat, pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah Jenis ikan yang diintervensi pengelolaannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Target Jenis Ikan berjumlah 6 (enam), yaitu Hiu Paus, Teripang, BCF, Karang, Lumba lumba/ Cetacea Dan duyung/mamalia.

Upaya yang dilakukan melalui:

- 1) Pendataan populasi/sebaran/jenis ikan (Hiu Paus, Teripang, BCF, Lumba-lumba/ cetacea, Dugong)
- 2) Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan/mamalia laut terdampar (Dugong/ Mamalia)
- 3) Rehabilitasi habitat/pemulihan populasi/kelimpahan jenis ikan dilindungi/terancam punah (BCF dan Karang)
- 4) Penanganan respon cepat jenis biota (Dugong/Mamalia)

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat kritis jenis ikan, dan/ atau penanganan respon cepat.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

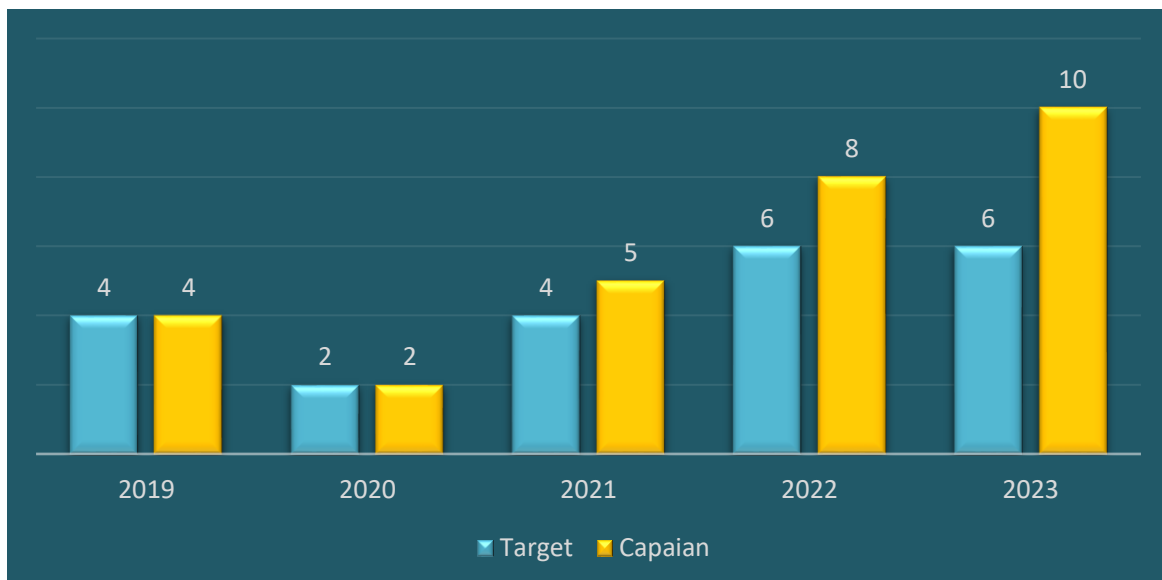
Berdasarkan tabel di bawah, IKU 4 ini sudah memenuhi target tahun 2023 dengan capaian 10 jenis dari target enam jenis. Enam jenis yang menjadi target antara lain Hiu Paus, Teripang, BCF, Lumba-lumba, Dugong, dan Karang, sedangkan pada capaian terdapat tambahan jenis Hiu Pari, Sidat, Penyu, Anemon. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (delapan jenis). Kenaikan ini dikarenakan adanya blokir anggaran kegiatan survei kemunculan cetacea (lumba-lumba) pada tahun sebelumnya yang dapat direalisasikan pada tahun 2023.

Tabel 17. Capaian Realisasi IKU 5

SS - 4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/ atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
8	6	10	166.67 atau 120 (kinerjaku)	25	6	166.67 atau 120 (kinerjaku)	8	125

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian IKU4 ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan capaian 10 jenis dibandingkan dengan 8 jenis pada tahun sebelumnya. Untuk perbandingan lebih lengkapnya berdasarkan grafik di bawah:



C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja IKU4 pada tahun 2023 adalah 10 Jenis dari target enam jenis. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang menetapkan target delapan jenis, maka sudah melebihi target jangka menengah organisasi, Hal tersebut dengan catatan bahwa target jenis tersebut tidak mengalami perubahan dalam perencanaan jangka menengah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan capaian target IKU5 antara lain adalah: penempatan enumerator hiu paus, hiu pari, sidat, dan teripang yang tepat sasaran membantu terealisasinya pendataan yang dilakukan secara kontinu di BPSPL Makassar, Pelaksanaan monitoring CSC Konawe yang berkelanjutan sesuai jadwal, penentuan waktu survey BCF yang tepat sehingga pelaksanaan survey bisa berlangsung dengan baik, penentuan lokasi sosialisasi di tempat-tempat yang strategis yang masyarakatnya membutuhkan penyadartahuan mengenai status biota dilindungi, pembinaan dan komunikasi yang baik dengan kelompok penerima bantuan KOMPAK sehingga pendataan penyu dapat terealisasi.

Sedangkan faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan adalah faktor cuaca yang tidak menentu dan bisa berakibat terhambatnya pelaksanaan survey. Selain faktor cuaca, ketidak sanggupan enumerator dalam menghadapi kondisi di lapangan juga menjadi faktor kegagalan dalam pencapaian kinerja ini. Hal ini terbukti dengan mundurnya enumerator hiu pari di Kabupaten Sangihe namun hal ini sudah diakomodasi dengan digantikan oleh enumerator yang lain.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian progress IKU 5 adalah seleksi enumerator yang dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) sangat efektif dalam meminimalisasi **bahkan tidak ada penggunaan anggaran** dalam proses rekrutmen enumerator.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian IKU ini

antara lain:

- Pendataan Hiu paus di Botubarani
- Pendataan Hiu pari di Paotere, Pulau Ambo, Wanggarasi dan Kab. Kep. Sangihe, serta TPI Beba
- Pendataan Sidat di Kab. Poso
- Pendataan Teripang Pulau Barrang lombo
- Pendataan Penyu di Kab. Polewali Mandar dan Kabupaten Pinrang
- Monitoring Jenis Biota Dilindungi (Banggai Cardinal Fish) di Banggai
- Monitoring CSC di Konawe dan Manado
- Rehabilitasi Anemon Habitat BCF di Banggai
- Monitoring dan Pendataan Habitat Dugong (Lamun)
- Monitoring dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (Lumba-lumba)
- Respon cepat penanganan biota laut terdampar
- Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah

Sampai dengan akhir tahun 2023 semua kegiatan di atas sudah dilaksanakan. Pendataan oleh enumerator, pendataan juga dilakukan oleh Staff BPSPL Makassar yaitu Pendataan Hiu Pari di TPI Paotere, pendataan jenis ikan dilindungi di wilker dilakukan oleh PPNPN yang ada di wilker, dan pendataan penyu dilakukan oleh kelompok binaan yang telah menerima bantuan KOMPAK. Berikut ini adalah kegiatan pendataan/ survey yang sudah dilakukan s.d. TW III 2023:



Gambar 12. Infografis Pendataan dan Survey Biota Laut Dilindungi

1. Pendataan Hiu Pari

Kegiatan pendataan hiu pari dilaksanakan oleh enumerator di tiga lokasi yaitu Pulau Ambo, Wanggarasi, dan Kab. Sangihe, serta TPI Beba di Kab. Takalar pada TW IV. Selain di tiga lokasi tersebut pendataan juga dilakukan oleh Staff BPSPL Makassar di TPI Paotere dan TPI Beba. Selain melakukan pendataan, enumerator juga melakukan sosialisasi perlindungan jenis ikan dilindungi kepada stakeholder (nelayan dan pengepul) di sekitar lokasi pendataan.



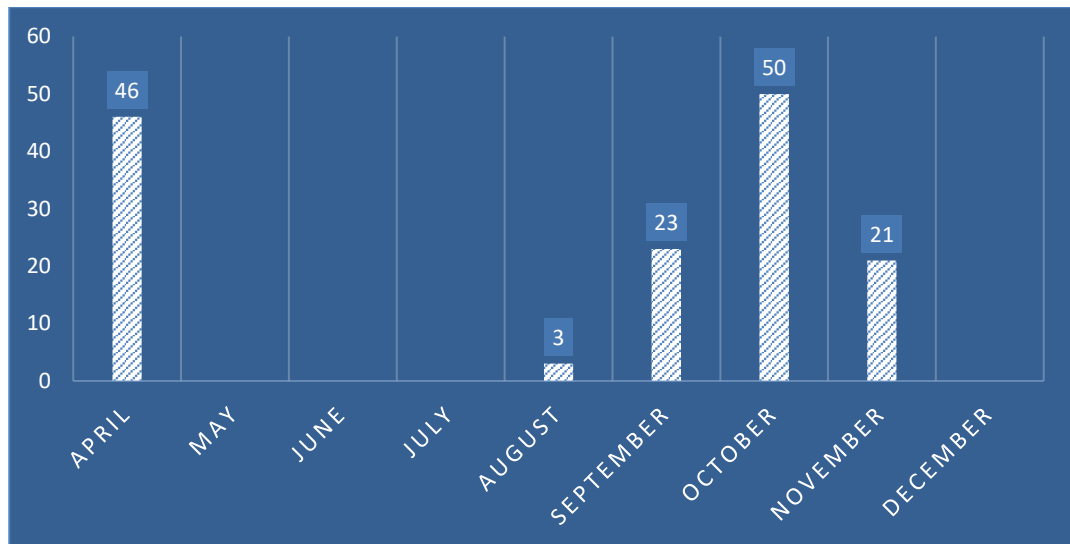
Gambar 13. Sosialisasi perlindungan jenis ikan oleh enumerator

1.1 Pendataan Pendaratan Hiu Pari di Kab. Sangihe, Sulawesi Utara



Sampai dengan TW III total hiu yang didaratkan berjumlah 46 ekor, tetapi kegiatan enumerator yang berlangsung tidak maksimal akibat ketidaksiapan enumerator dalam menghadapi kondisi di lapangan yang

menyebabkan enumerator mengundurkan diri dan digantikan oleh enumerator yang baru. Setelah dievaluasi, data yang dikumpulkan dan laporan yang telah dibuat oleh enumerator kurang bisa diandalkan karena validasi spesies yang diidentifikasi oleh enumerator dan dimasukkan ke dalam laporan terdapat ketidaksesuaian dengan dokumentasi yang dikirimkan. Jumlah total pendaratan hiu pari selama tahun 2023 adalah 143 ekor dengan pendaratan terbesar terdapat di bulan Oktober sejumlah 50 ekor. Berikut ini adalah grafik hasil pendataan hiu pari di Kab. Sangihe pada tahun 2023:



1.2 Pendataan Pendaratan Hiu Pari di Wanggarasi, Gorontalo

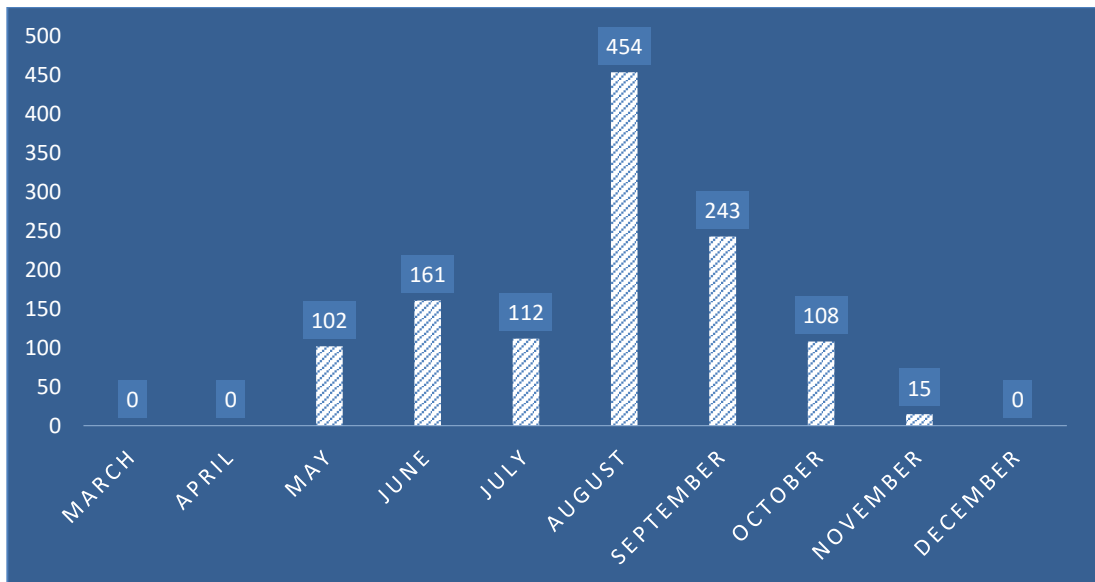


Sampai dengan Triwulan III 2023 tidak terdapat hiu pari yang didaratkan di TPI Wanggarasi, Gorontalo. Hal ini karena terdapat permasalahan pengepul belum membayar nelayan hasil tangkapannya semenjak tahun lalu sehingga nelayan tidak mempunyai modal untuk melaut. Enumerator telah mendata lokasi lain pendaratan hiu pari diantaranya di TPI Lemito dan Pantai Popoyato namun hiu yang didaratkan hanya satu dua ekor. Karena kondisi tersebut maka pendataan hiu pari di TPI Wanggarasi ditiadakan di TW IV dan dialihkan ke TPI Beba, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan.

1.3 Pendataan Pendaratan Hiu Pari di Pulau Ambo, Sulawesi Barat



Jumlah Hiu Pari yang didaratkan di Pulau Ambo selama tahun 2023 sejumlah 1195 ekor. Pendataan di pulau ambo paling banyak terdapat di Bulan Agustus. Pendaratan baru terdapat di Bulan Mei sampai dengan November.



1.4 Pendaratan Hiu Pari di TPI Beba, Takalar



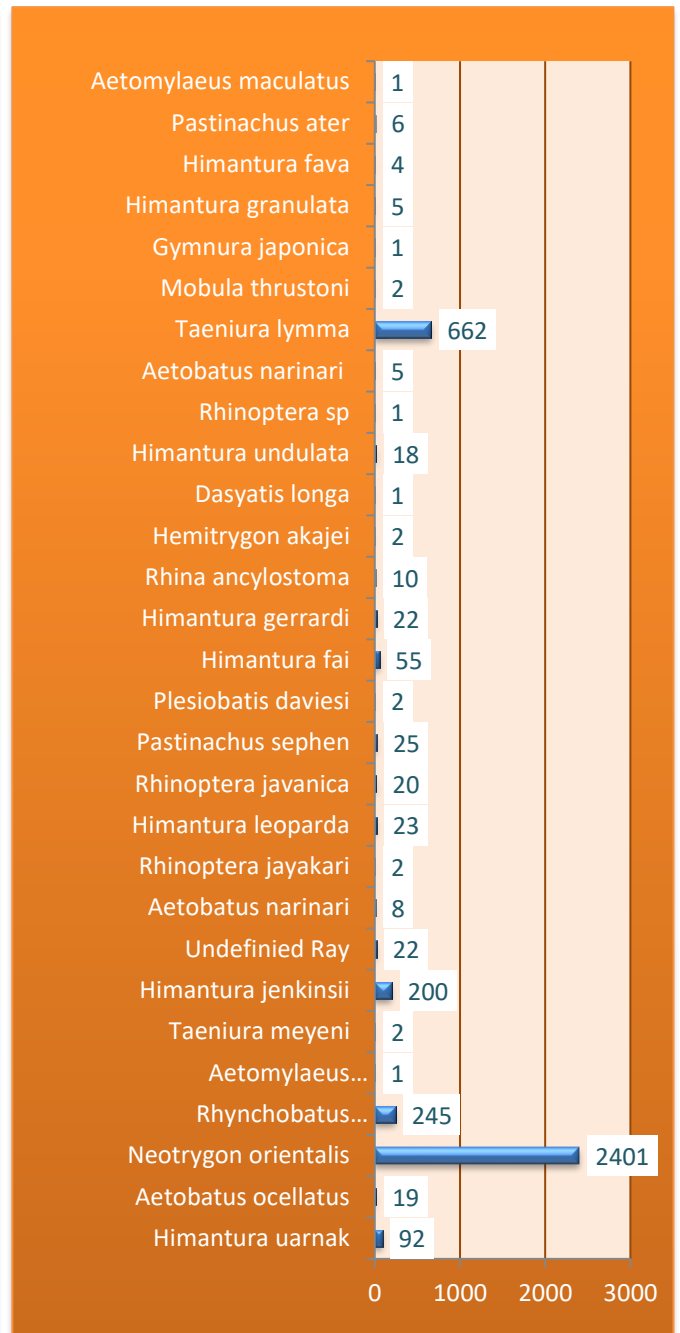
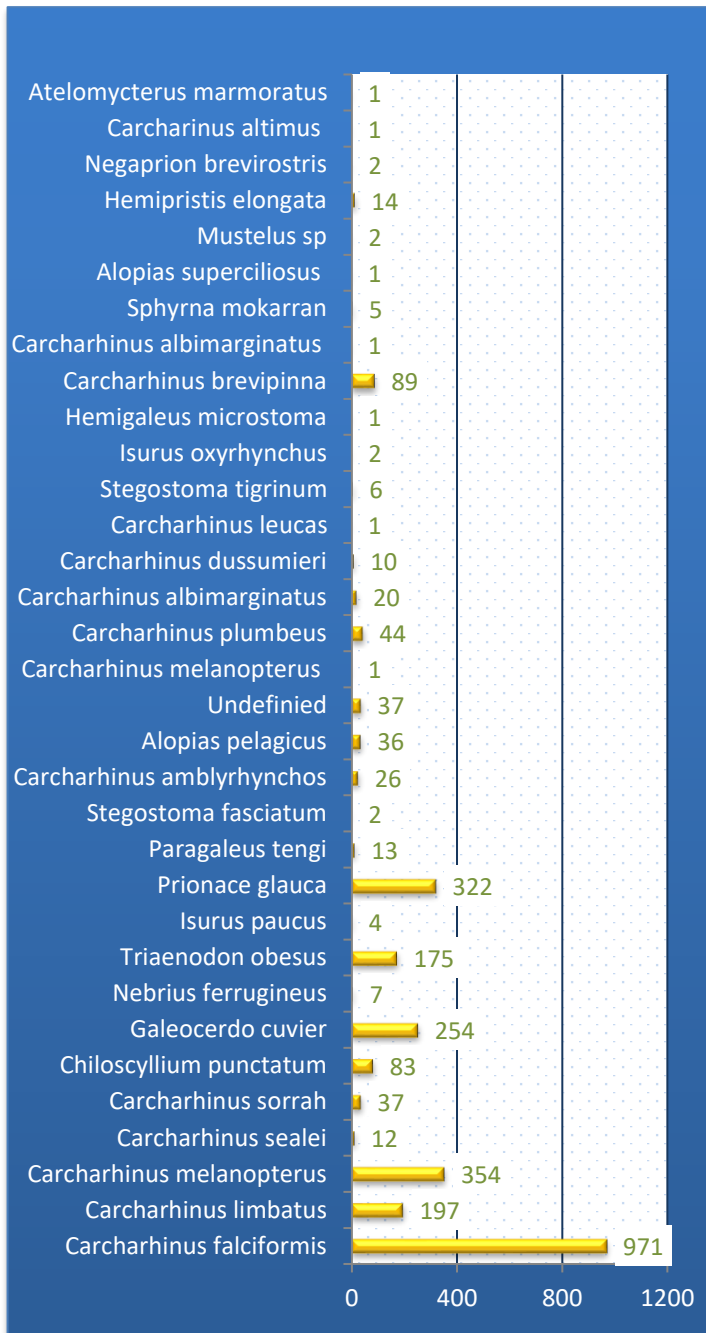
Pendataan pendaratan hiu pari oleh enumerator di TPI Beba, Takalar berlangsung mulai bulan November. Pendataan ini dilakukan setelah mereviu pendataan yang dilakukan di Wanggarasi tidak efektif karena tidak terdapat pendataan selama setahun. Total hiu yang didaratkan

pada Bulan November adalah 217 ekor, sedangkan pari 252 ekor. Sedangkan jumlah total pendaratan selama setahun adalah 541 ekor hiu dan 1487 ekor pari. Pendataan ini dilakukan oleh mahasiswa PKL dari Bulan Februari s.d. Mei dan dilanjutkan oleh enumerator di Bulan November.

1.5 Pendaratan Hiu Pari di TPI Paotere, Makassar

Pendaratan Hiu Pari di TPI Paotere dilakukan oleh staff BPSPL Makassar dan mahasiswa PKL yang ditempatkan di TPI Paotere. Pendataan ini berlangsung setiap hari seperti yang dilakukan enumerator Hiu Pari. Hasil pendataan hiu pari di TPI Paotere selama setahun sebanyak 829 ekor hiu dan 2165 ekor pari yang didaratkan dengan jenis *Carcharhinus melanopterus*, *falciformis*, dan *limbatus* yang dominan serta *Neotrygon orientalis* untuk jenis pari.

Berikut adalah grafik total pendaratan hiu pari yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 14. Grafik total pendaratan hiu dan pari di wilayah kerja BPSPL Makassar

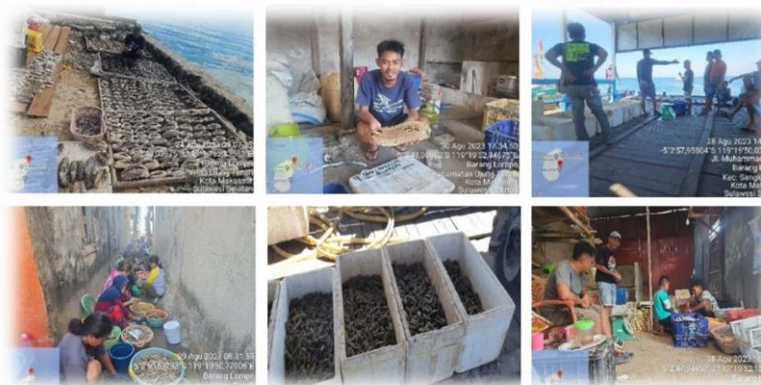
2. Pendataan Sidat di Kab. Poso, Sulawesi Tengah



Pendataan sidat dan glass eel dilakukan di muara Sungai Poso dan berlangsung mulai Bulan Maret hingga November 2023. Berdasarkan pelaksanaan pendataan yang dilakukan ada beberapa informasi yang diperoleh yaitu hasil tangkapan sidat dewasa (sidat konsumsi) dipasarkan di wilayah Tentena dan sekitarnya tanpa adanya distribusi masif ke luar wilayah kabupaten Poso. Masih terdapat hasil tangkapan sidat dewasa *Anguilla marmorata* dengan berat diatas 5 Kg. Total jumlah pendataan sidat dewasa adalah 1834.8 kg / 525 ekor sedangkan jumlah total glass eel adalah 10358.06 gr. Berikut ini adalah hasil pendataan sidat dewasa dan glass eel selama setahun.

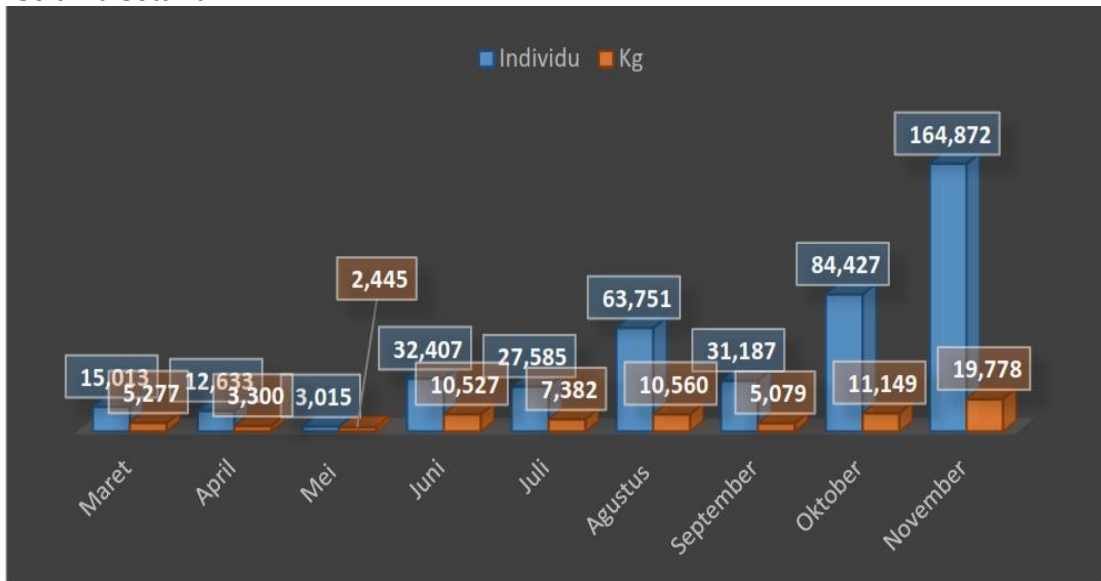


3. Pendataan Teripang di Barrang Lompo, Sulawesi Selatan



Sampai dengan Bulan November telah teridentifikasi teripang sebanyak 27 jenis dengan jumlah tangkapan sebanyak 445.918 ekor atau 74.127 kg dengan jenis dominan yaitu jenis teripang yang paling

banyak tertangkap yakni teripang Stichopus naso/ teripang duri sebesar 399,005 ekor atau 42,999 kg dan yg terendah jenis teripang Stichopus Chloronotus sebesar 35 ekor atau 15 kg. Penangkapan paling banyak terdapat di bulan November. Berikut adalah hasil pendaratan teripang yang dilakukan selama setahun:

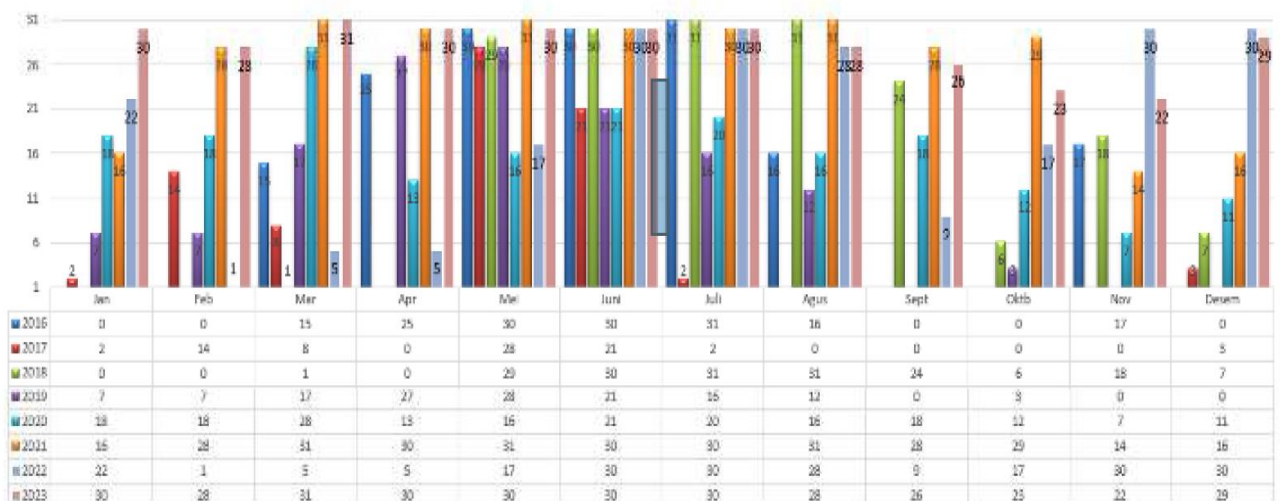


Kendala dalam melaksanakan pendataan antara lain Nelayan takut untuk memberikan informasi secara detail terkait jumlah tangkapan yang didaratkan khususnya terkait jenis teripang appendiks II, Pengusaha ataupun pengepul teripang tidak mau terbuka terkait distribusi teripang yang mereka jual, lokasi pendaratan berbeda-beda khususnya nelayan harian ataupun mingguan.

4. Pendataan Hiu Paus di Botubarani, Gorontalo

Pemantauan menggunakan Photo ID Sejak 01 Januari –31 Desember 2023 di perairan Botubarani tepatnya di zona Interaksi Hiu paus, 10 individu berhasil teridentifikasi, enam diantaranya merupakan individu baru yaitu ID 53, 54, 55, 56, 57, dan 58 (teridentifikasi tahun 2023), sedangkan empat diantaranya merupakan individu lama yaitu ID 21, 31, 44 dan 53. Pola kemunculan hiu paus pada tahun 2023 adalah sepanjang tahun dari Januari – Desember dengan jumlah kemunculan terbanyak adalah pada bulan Juli dan Juni dengan tujuh ekor. Berikut adalah kalender kemunculan hiu paus dari tahun 2016 s.d. 2023:

Kelender Musiman 2016 - 2023



Jumlah total wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Hiu Paus Botubarani adalah 21.003 orang wisatawan dengan rincian 19.480 wisatawan domestik dan 1.523 wisatawan mancanegara. Wisatawan paling banyak terdapat di Bulan Mei sejumlah 3958 orang wisatawan. Kendala dan permasalahan di wisata hiu paus Botubarani yaitu, seringnya terjadi konflik antara pangkalan, saranan dan prasarana yang belum memadai, pengelolaan yang kurang efektif, dan belum adanya batas-batas zona interaksi hiu paus.



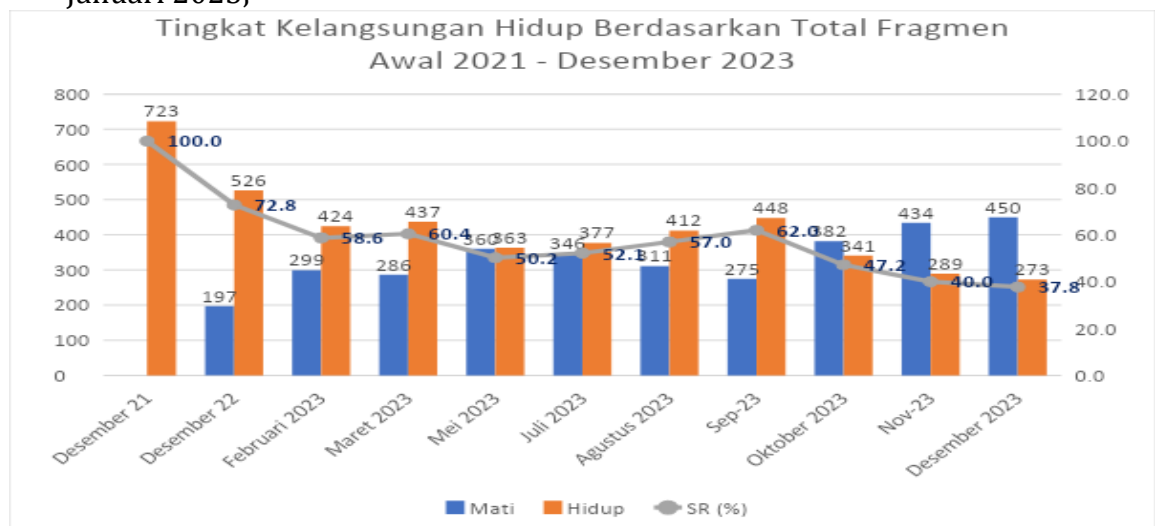
Gambar 15. Dokumentasi kegiatan enumerator Hiu Paus

5. Monitoring CSC

5.1 Bokori, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara

Sampai dengan akhir Tahun 2023 Monitoring CSC di Konawe telah dilakukan sebanyak sembilan kali. Monitoring ini dilakukan untuk membersihkan sedimen yang mengendap dan organisme biofouling khususnya alga, spong, teritip, dan biota lainnya yang menempel pada fragmen karang dan media rak. Tingkat Kelangsungan Hidup atau Survival Rate (SR) pada transplantasi karang pada media Rak dan Spider sampai dengan Desember 2023 yaitu :

- Berdasarkan total fragmen karang yang hidup pada November 2023, maka diperoleh SR sebesar 94,5%, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,7% dari SR 84,75% pada bulan November 2023;
- Berdasarkan total fragmen karang yang hidup pada Desember 2022/Januari 2023, maka diperoleh SR pada bulan Desember sebesar 51,9%, dimana terjadi penurunan sebesar 20,9% dari SR pada bulan Desember 2022/Januari 2023;



Gambar 16. Survival rate CSC Pulau Bokori



Masih rendahnya tingkat kelangsungan hidup disebabkan oleh tingginya volume algae yang menempel pada media dan fragmen karang sehingga berdampak pada kematian karang, disamping itu masih terdapat media yang mengalami kerusakan yang belum dilakukan pergantian fragmen secara keseluruhan. Selain itu juga tercatat kemunculan

berbagai biota di Coral Stock Center Pulau Bokori yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan November yaitu diperoleh 11 Family biota laut dan 18 jenis biota laut.

5.2 Monitoring CSC Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Selama tahun 2023 kegiatan monitoring sudah berlangsung selama 10 kali. Kegiatan pemeliharaan dan pembersihan dilakukan pada media rak transplantasi dan fragmen karang yang bertujuan untuk melakukan pembersihan dari sedimen, algae, sponge, dan biota laut lainnya yang mengganggu pertumbuhan fragmen karang serta melakukan penggantian substrat/donat yang rusak/hilang dan fragmen karang yang mati.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemampuan terumbu karang bertahan hidup (survival rate) untuk semua rak transplantasi didapatkan hasil survival rate sebesar 83.17%; Berdasarkan hasil pengukuran laju pertumbuhan karang yang dilakukan diperoleh data laju pertumbuhan paling tinggi adalah pada jenis karang *Acropora formosa* dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 9.8 cm dan laju pertumbuhan paling rendah adalah pada jenis karang *Isis sp.* dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0.4 cm. Berikut adalah survival rate tiap jenis karang.

No. Rak	Jenis Karang	Jumlah Fragmen Hidup Bulan Desember	Jumlah Fragmen Mati	SR (%)	Penggantian Fragmen Karang
1	Bambu laut	16	0	100	0
2	<i>Acropora formosa</i>	16	0	100	0
3	<i>Echinopora sp</i>	16	0	100	0
4	<i>Acropora loripes</i>	2	14	12,5	14
5	<i>Pocillopora sp</i>	15	1	93,75	1
6	Bambu laut	16	0	100	0
7	<i>Acropora formosa</i>	16	0	100	0
8	<i>Acropora sp</i>	7	9	43,75	9
9	<i>Echinopora sp</i>	16	0	100	0
10	<i>Styllopora sp</i>	16	0	100	0
11	<i>Acropora loripes</i>	7	9	43,75	9
12	<i>Hydnophora rigida</i>	15	1	93,75	1
13	<i>Serriatophora sp</i>	15	1	93,75	1



Terdapat kemunculan berbagai biota di Coral Stock Center (CSC) Malalayang pada monitoring tahap X bulan Desember 2023 yaitu 8 jenis ikan karang; dan pada monitoring tahap X di CSC Malalayang pada bulan Desember 2023 dilakukan pengukuran kualitas air sebagai data pendukung. Data kualitas air yang diukur pada kegiatan monitoring adalah suhu, salinitas, pH, Electrical Conductivity (EC), dan Total Dissolved Solids (TDS). Dari pengukuran kualitas air diperoleh data suhu 30.3C, salinitas 3.03‰, pH 7.16, Electrical Conductivity (EC) 49.4 mS/cm, dan Total dissolved solids (TDS) 24.7 ppt.

Pada dasarnya CSC Malalayang dan Bokori memerlukan tindak lanjut atau penanganan yang serupa untuk menekan Ttingkat

kematian karang yaitu dengan pelaksanaan monitoring sesuai jadwal agar meminimalisasi algae, lumut, dan sedimen pada media rak transplantasi

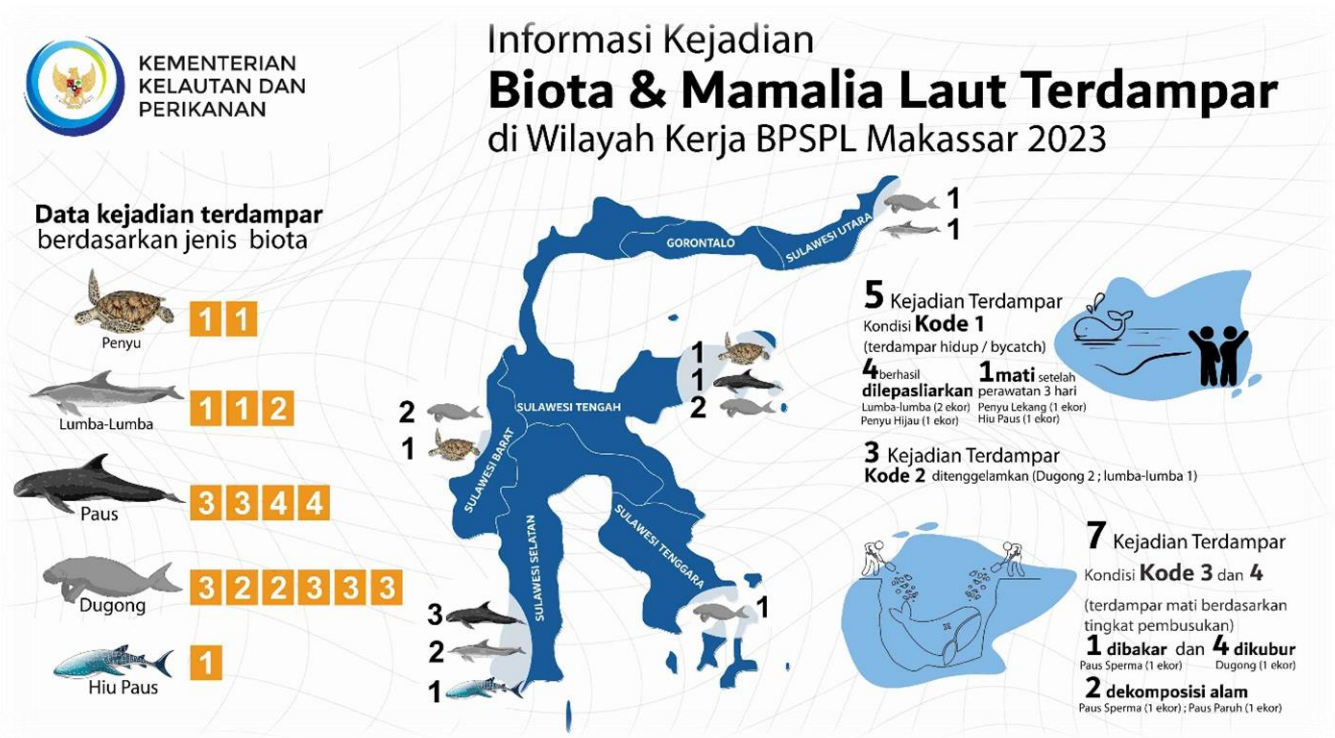
6 Penanganan Biota Laut Terdampar



Total kejadian biota atau mamalia laut terdampar di wilayah kerja BPSPL Makassar pada 2023 sebanyak **16 kejadian**, dengan **total individu biota dan mamalia laut yang terdampar sebanyak 16 ekor**, dengan sebaran kejadian tertinggi pada bulan Maret (4 kejadian). Kejadian terbanyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (6 kejadian) Dimana kondisi terbanyak ditemukan pada kondisi mati (kode 2, 3, dan 4) sebanyak 11 ekor.

Biota atau mamalia laut yang terdampar diantaranya adalah dugong, lumba-lumba, paus, dan penyu serta hiu paus dengan kondisi dan metode penanganan yang beragam.

Informasi kejadian biota laut terdampar berasal dari beberapa sumber diantaranya grup WA, media sosial, jejaring, dan instansi sekitar. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Berdasarkan infografis dapat diketahui jenis yang paling banyak terdampar yaitu **dugong sebanyak enam ekor** dengan semuanya berada dalam kondisi mati (kode 2 dan 3). Kendala yang dihadapi relatif sama dalam setiap tahunnya jarak dan aksesibilitas ke lokasi yang jauh, identifikasi jenis yang membutuhkan waktu dan ketepatan, kurangnya sarana pendukung penanganan di sekitar lokasi kejadian, serta lamanya penyampaian dan penerimaan informasi ke tim BPSPL Makassar.



Kelautan Perikanan, Stasiun SDKP, Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, serta spara mahasiswa PKL sebagai sarana pembelajaran.

Untuk menanggulangi kendala tersebut, BPSPL Makassar secara berkelanjutan melakukan upaya penyadartahuan dan penguatan jejaring. Pihak yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah para jejaring seperti Cabang Dinas Kelautan, Dinas

7 Edukasi dan Sosialisasi keanekaragaman hayati perairan dilindungi/terancam punah



Pada Tahun 2023 sudah dilaksanakan sosialisasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah di beberapa lokasi wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya:

- Sosialisasi biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah di Desa Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023;

- Sosialisasi biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan Sosialisasi Kelembagaan Masyarakat Pengawas Konservasi di KKP3K Morowali di Desa Matube dan Desa Koya, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juni 2023;

- Sosialisasi Jenis Biota Perairan Dilindungi di Kawasan Konservasi Doboto di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten 10 Donggala, Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023;

- Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023;

- Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah di Kelurahan Tallo,

Perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah di Kelurahan Tallo,

Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023;

- Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dalam Rangka Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Desa Pasi Pasi, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus 2023;
- Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah Penguatan kegiatan Konservasi oleh Masyarakat Pulau dalam Mendukung Kawasan Konservasi di Pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2023;
- Sosialisasi dan Penyadartahuan Mengenai Biota Laut Dilindungi dan Terancam Punah di Desa Mbuang-mbuang, Kecamatan Bongan kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2023;
- Penyadartahuan dan Pengenalan terkait Kawasan Konservasi dan Biota Laut yang Dilindungi dan/atau Termasuk Daftar Appendiks CITES di Pulau Salissingan, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kota Mamuju, Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 5 November 2023; dan
- Pembinaan Kepada Masyarakat tentang Biota Laut yang Dilindungi dan Terancam Punah di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023.

8 Survey Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah

Pelaksanaan survey berlokasi di Desa Santigi dan Desa Sabang, Kab. Toli toli. Alasan pemilihan kedua lokasi tersebut karena masuk dalam pendataan DSCP Tahun 2016 berdasarkan Kepdirjen PRL No. 67 Tahun 2022 dan informasi terkini terkait temuan dugong. Metodologi kegiatan survei berdasarkan juknis adalah wawancara, pengamatan jejak makan, pengamatan visual dugong, dan pengamatan melalui survei udara dengan drone. Berdasarkan hasil survei, di Desa Santigi ditemukan dugong sebanyak satu ekor sedangkan di Desa Sabang hanya ditemukan jenis lain (penyu) dan ditemukan *feeding trail*.



Lokasi temuan feeding trail di Desa Sabang ditemukan sebanyak enam titik dengan panjang dengan Panjang 3-7 meter dan lebar 15-20 cm.

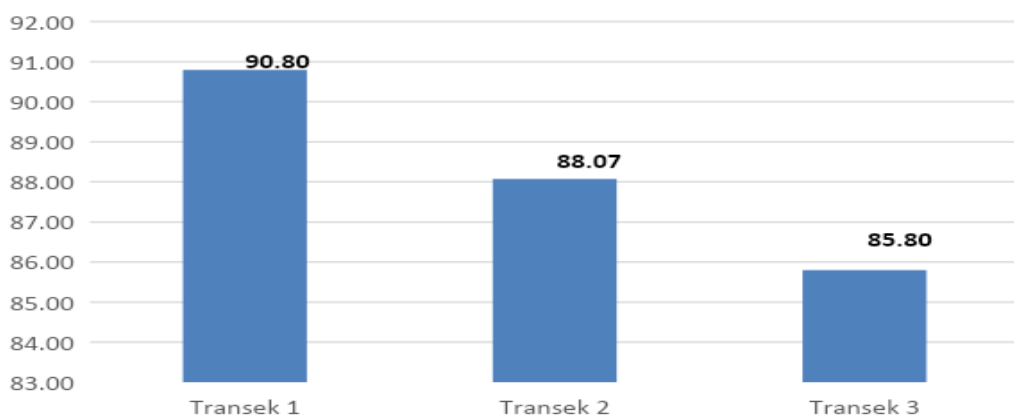


Berdasarkan hasil pengamatan baik di Desa Santigi teridentifikasi **lima jenis lamun** yaitu *Thalassia hemprichii*, *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Halophila ovalis*, dan *Syringodium isoetifolium*. Sama halnya di Desa Sabang, juga terdapat lima jenis lamun yaitu *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halophila ovalis*, *Syringodium isoetifolium*. Jenis lamun pada jejak makan yang ditemukan yaitu jenis *Syringodium isoetifolium*.

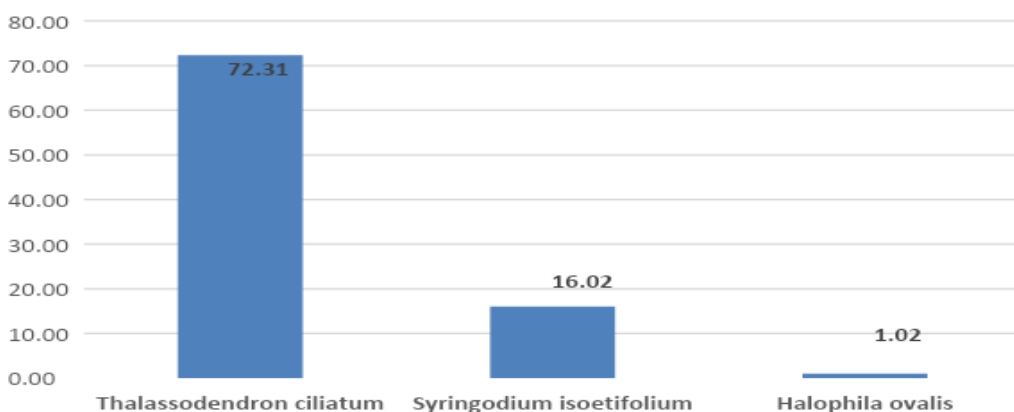
Persentase rata-rata tutupan habitat lamun di Desa Santigi

sebesar 57,95% dengan nilai strandar deviasi sebesar 19,03%. Dari rata-rata tutupan lamun yang diamati, diperoleh jenis dan dominansi lamun yang ditemukan terdiri dari jenis Cymodecea Rodundatta dengan dominansi sebesar 40,53% dan Haludole uninervis dengan nilai dominansi sebesar 17,42%.

Rata-Rata Penutupan Lamun tiap transek di Desa Sabang (%)



Dominansi jenis lamun di Desa Sabang (%)



Persentase rata-rata tutupan lamun di Desa Sabang sebesar 88,22% dengan

nilai strandar deviasi sebesar 18,03%. Jenis dan dominansi lamun yang ditemukan terdiri dari jenis *Thalassodendron ciliatum* dengan nilai dominansi sebesar 72,31%; *Syringodium isoetifolium* dengan dominansi sebesar 16,02%; dan *Halophila ovalis* dengan nilai dominansi sebesar 1,02%

9 Rehabilitasi Mikrohabitat BCF (Anemon)

Kegiatan rehabilitasi anemon (BCF) di Kabupaten Banggai Laut dilaksanakan pada tanggal 25 – 30 Oktober Kegiatan rehabilitasi di Desa Bonebaru, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Metodologi pelaksanaan kegiatan ini adalah diawali dengan pengambilan dan pemilihan bibit anemone. Jumlah anemon yang dijadikan sebagai indukan sebanyak 80 (Delapan Puluh) ekor anemone. Komposisi indukan anemo yang dilakukan fragmentasi (pembelahan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Anemon			
	<i>Stichodactyla gigantea</i>	<i>Heteractis crispa</i>	<i>Heteractis magnifica</i>
Jumlah	40 Ekor	20 Ekor	20 Ekor

Setelah itu dilanjutkan dengan proses produksi anemone secara aseksual (fragmentasi). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, *Stichodactyla gigantea* (anemon karpet) merupakan jenis anemon yang memiliki ketahanan tubuh dan proses penyembuhan paling stabil dibandingkan jenis anemon lain yang dilakukan pembedahan seperti *Heteractis crispa*, dan *Heteractis magnifica*. Persentasi keberhasilan jenis *Stichodactyla gigantea* mencapai 90%. Sedangkan jenis anemon lain sekitar 65%.



Tahapan selanjutnya adalah penebaran anemone hasil fragmentasi. Penebaran anemon hasil fragmentasi dilakukan di Desa Bonebaru, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi sebagai habitat Ikan Capungan Banggai (BCF) yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan populasi anemon sebagai

microhabitat dari ikan BCF yang disebabkan selain karena faktor alam seperti pemanasan global dan faktor pemanfaatan secara langsung dari Masyarakat. Anemon yang akan ditebarkan di lokasi tersebut, merupakan hasil fragmentasi yang dilakukan dan kondisinya sudah layak untuk dilakukan penebaran di alam

setelah melalui proses penyembuhan pasca pembedahan. Anemon-anemon tersebut ditebar disekitar terumbu karang, lamun yang disekitarnya terdapat Ikan Capungan Banggai. Penebaran anemon tersebut, selain memperhatikan kondisi lingkungan ekosistemnya juga harus memperhatikan kondisi kualitas air agar anemon tersebut bisa sustainable dan sesuai dengan kondisi lingkungan untuk kelestariannya.

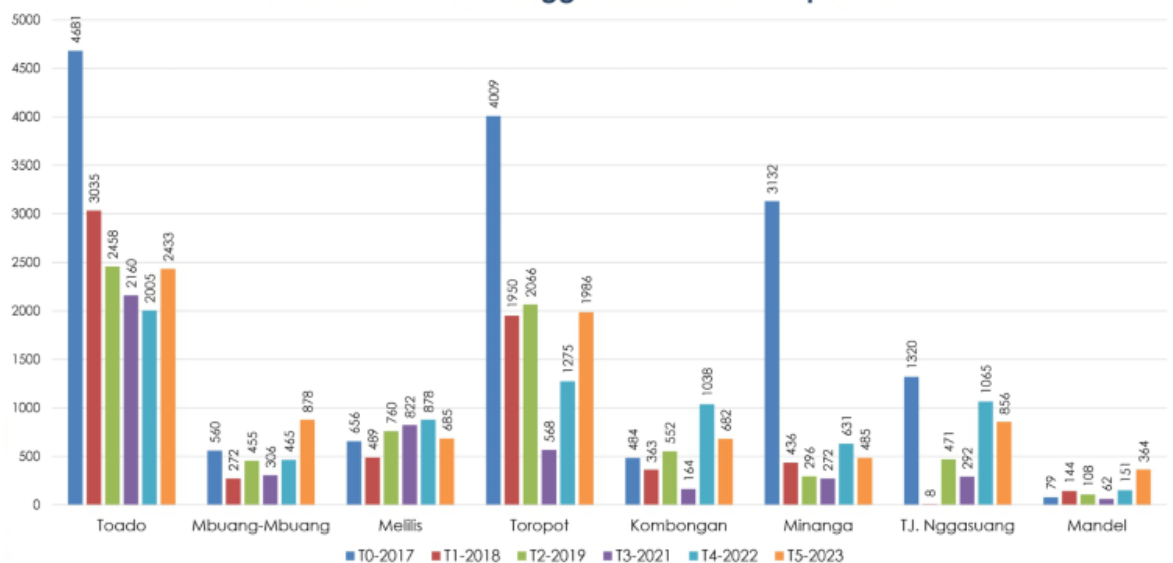
Monitoring anemon di lokasi penebaran akan dilakukan setiap bulan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi mitra BPSPL Makassar dalam pelaksanaan kegiatan. Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi penting karena masyarakatlah yang nantinya akan membantu BPSPL Makassar dalam melaksanakan monitoring anemon yang telah ditebar di lokasi penebara. Selain itu juga diharapkan masyarakat yang terlibat dapat membantu mensosialisasikan ke masyarakat sekitar tentang pentingnya microhabitat anemon untuk kelangsungan populasi Ikan Capungan Banggai (BCF) di Kabupaten Banggai Laut.

10 Monitoring Jenis Ikan Dilindungi BCF

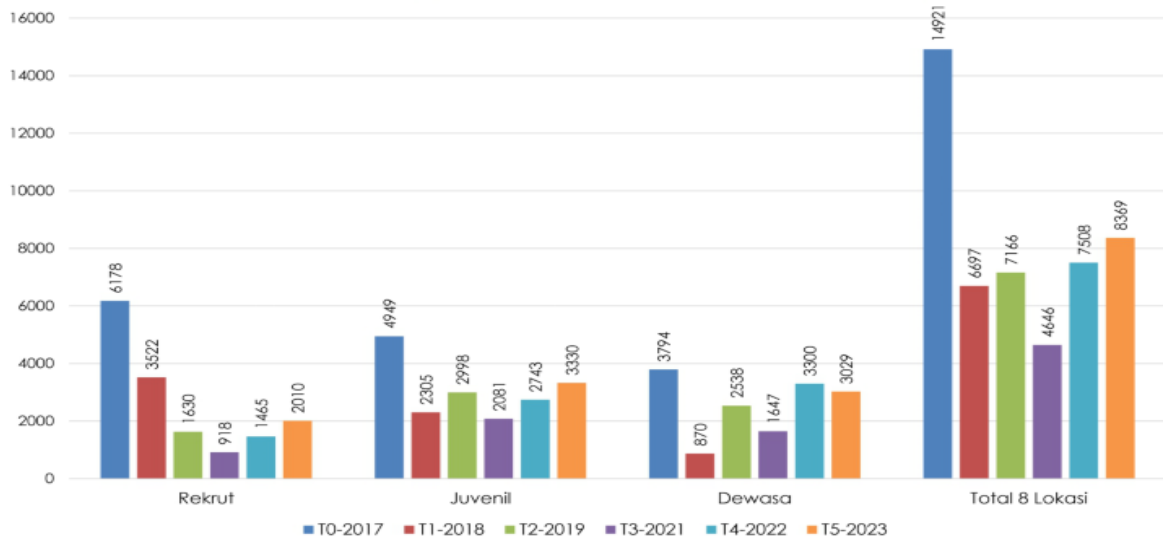


Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, telah dilakukan monitoring / pemantauan kepadatan populasi Banggai Cardinal fish (BCF) dan mikrohabitatnya di sejumlah lokasi (site) monitoring di Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, yaitu dari tahun 2017 (T0), 2018 (T1), 2019 (T2), 2021 (T3) dan 2022 (T4). Pada tahun 2023 ini juga dilakukan monitoring lanjutan. Berikut ini adalah perbandingan hasil monitoring dalam enam tahun terakhir:

Jumlah Individu Banggai Cardinalfish Tiap Lokasi



Jumlah Individu Banggai Cardinalfish Berdasarkan Kelompok Umur



Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat Penurunan kelimpahan populasi BCF terjadi di site Melilis, Kombongan, Minanga, dan Tj. Nggasuang. Pada empat site lainnya yakni Toado, Mbuang-Mbuang, Toropot, dan Mandel kelimpahan populasi BCF mengalami peningkatan dari tahun

2022. Pada monitoring T5 (2023) populasi bulu babi mengalami penurunan di sebagian besar site monitoring sedangkan populasi anemon justru mengalami peningkatan di sebagian besar site monitoring. Penurunan kelimpahan populasi Banggai Cardinalfish (*P. kauderni*) di empat site monitoring T5 (November 2023) di Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut di indikasikan akibat adanya pemanfaatan mikrohabitat bulu babi dan anemon untuk keperluan konsumsi yang kembali dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di beberapa lokasi masih rendah terhadap pentingnya microhabitat bulubabi dan anemon sebagai rumah atau tempat berlindung BCF. Banggai Cardinalfish (*P. kauderni*) juga ditemukan di habitat algae, khususnya di site Minanga seperti halnya pada monitoring T4 (2022). Berdasarkan hasil monitoring T5, terlihat adanya pergeseran habitat BCF dari lamun ke akar mangrove dekat lamun seperti pada hasil monitoring T4.

11 Survei Pendataan dan Pemantauan Cetacean di Kabupaten Bulukumba



Kegiatan pendataan dan pemantauan cetacean dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 10 November 2023 yang berlokasi di perairan Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengambilan data menggunakan metode observasi langsung dan metode wawancara. Berdasarkan data hasil observasi dan pemantauan secara langsung di perairan desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, terdapat 5 kejadian kemunculan cetacea yang ditemukan. Dimana lokasi kemunculan 4 diantaranya berada pada sisi selatan pantai Desa Bira diantara Tanjung

Bira dengan Pulau Liukang Loe, sedangkan satu kejadian kemunculan ditemukan pada sisi timur perairan desa Bira. Adapun data hasil pengamatan langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tanggal	Kemunculan		Identifikasi jenis	Individu/ kelompok	Keterangan
	awal	akhir			
6 Nov 23	08:00	08:20	Tidak Teridentifikasi	Kelompok	Jarak >300m dari kapal
7 Nov 23	15:53	16:23	<i>Stenella longirostris</i>	Kelompok	Jumlah >10 ekor, terbagi 2 kelompok
8 Nov 23	17:34	17:39	<i>Grampus griseus</i>	Kelompok	Terdapat 3 individu (dari observer)
9 Nov 23	5:56	07:04	<i>Stenella longirostris</i>	Kelompok	Jumlah >30 individu; terlihat ada beberapa ekor berupa anakan
10 Nov 23	08:11	08:25	<i>Grampus griseus</i>	Kelompok	Jumlah 3 individu (pemantauan dengan binocular)



Berdasarkan data hasil pengamatan dan pemantauan cetacea di perairan Desa Bira, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba baik yang diperoleh dari pengamatan secara langsung maupun wawancara waktu kemunculan pada pagi hari dan sore hari. Sedangkan untuk bulan kemunculan dari yang

dirangkul terdapat pada Bulan Februari, Oktober, dan November Dimana berada pada musim peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan data tersebut dapat diindikasikan sementara bahwa pola kemunculan terdapat di musim peralihan di waktu pagi dan sore hari, namun indikasi ini perlu kajian lebih lanjut seperti kajian pengamatan pola arus perairan, sebagai klorofil maupun kajian lain yang terkait. Terkait kondisi sosial ekonomi, tidak ditemukan adanya eksploitasi ataupun aktivitas destruktif terhadap biota cetacean di perairan Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut salah satunya disebabkan area pantai sebagian besar merupakan area untuk pemanfaatan wisata bahari, baik wisata pantai maupun wisata selam, sehingga dengan adanya kemunculan cetacean secara tidak langsung menjadi atraksi bagi para wisatawan.

12 Pendataan Penyu oleh Kelompok

Pendataan penyu oleh kelompok binaan BPSPL Makassar yaitu Kelompok Sahabat Penyu dilaksanakan tanpa menggunakan APBN. Selama tahun 2023 jumlah total telur yang terdata adalah 13.459 butir dengan prosentase keberhasilan menetas sebesar 83.54% atau 11.123 butir. Telur penyu yang berhasil menetas juga dilakukan pelepasliaran dengan melibatkan Masyarakat dengan sistem adopsi untuk menunjang operasional kelompok

G. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran untuk mendukung pencapaian IKU4 tahun 2023 adalah **Rp. 700.000.000** realisasinya sebesar **Rp. 695.424.053**. Detail informasi pagu dan realisasi untuk mendukung IKU 5 dapat dilihat pada tabel diawah ini:

Tabel 18. Realisasi Capaian IKU 5

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penyediaan data informasi dan genetik ikan dilindungi/ terancam punah	476,969,000	474,061,017	99.39
2	Rehabilitasi populasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/ terancam punah	123,245,000	121,652,818	98.71
3	Respon cepat penanganan dan penyelamatan biota dilindungi/ terancam punah	54,501,000	54,431,341	99.87
4	Sosialisasi biota dilindungi/ terancam punah	45,285,000	45,278,877	99.99
JUMLAH		700.000.000	695,424,053	99.35

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU4 pada Triwulan I Tahun 2024 adalah rekrutmen enumerator untuk melaksanakan pendataan jenis ikan yaitu hiu, pari, sidat, dan teripang.

3.1.5 IKU 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat, Softcoral, dan Teripang)
- Verifikasi pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat, Softcoral, dan Teripang)
- Verifikasi Stok Jenis Ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Makassar. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species*; pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dimanfaatkan; dan Verifikasi Stok Jenis Ikan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 19. Capaian Realisasi IKU 5

SS - 5		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar						
IKU - 5		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
9	5	10	200 atau 120 (kinerjaku)	11.1	5	200 atau 120 (kinerjaku)	3	120

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target IKU5 sudah melebihi target dengan capaian 10 jenis dari target lima jenis atau persentase capaian 200% atau capaian maksimal di kinerjaku 120%. Realisasi jenis pada IKU ini adalah Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Soft Coral, Anemon, Arwana, BCF, Kuda Laut Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya meningkat satu jenis atau 11.1% namun persentase realisasi kinerja sama-sama 120%. Peningkatan capaian ini karena terdapat pemanfaatan jenis ikan yang terdapat pada tahun 2023 yaitu kuda laut yang tidak terdapat di tahun sebelumnya.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 5 ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan, begitu juga dengan capaian beberapa tahun sebelumnya. Persentase realisasi capaian kinerja IKU ini selalu 120% dalam beberapa tahun

sebelumnya. Berikut adalah grafik capaian IKU ini tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.



C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi tahun ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi, maka capaian tahun ini sudah melebihi target jangka menengah organisasi dengan catatan bahwa target tersebut tidak mengalami perubahan dalam perencanaan jangka menengah.

Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja IKU 5 dengan Target Jangka Menengah Organisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	5	3	5	3	9	5	10	3 (kumulatif 17)	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam penerbitan surat rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis *look alike* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* sehingga proses verifikasi permohonan dapat dilakukan secara cepat dan relatif aman karena pada jenis *look alike* tidak dibatasi dengan kuota pengambilan dari alam yang rawan disalah gunakan oleh pelaku usaha. Tetapi untuk jenis yang masuk Appendiks CITES dan dilindungi, proses verifikasi tetap dilakukan secara langsung untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pelaksanaan verifikasi *soft coral* dan *anemone* secara online dan adanya penambahan jumlah produk maksimal yang verifikasinya dilaksanakan di kantor BPSPL Makassar, maka terdapat efisiensi anggaran berupa perjalanan dinas yang tidak perlu dibayarkan untuk pelaksanaan verifikasi online dan verifikasi langsung di kantor.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja IKU5 pada tahun 2023 antara lain:

- Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES
- Penyediaan data potensi dan status populasi jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES berupa pemeriksaan Stock Opname ke pelaku usaha
- Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi
- Survey Populasi Bambu Laut di Konawe Selatan

1. Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi, Appendiks CITES, dan look alike species

Selama Tahun 2023 telah dilakukan Pelayanan Perizinan di BPSPL Makassar berupa penerbitan **1520 Surat Rekomendasi** dan **160 SAJI**, Berikut di bawah ini adalah infografis pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dengan informasi detail perizinan untuk tiap jenis ikan:



Gambar 17. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkutan / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan yang paling banyak adalah dari jenis **soft coral** dengan total surat rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **718 Rekomendasi DN**, disusul dengan teripang, anemone, dan Hiu Pari. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak 119 SAJI, disusul dengan sidat, BCF, Arwana, dan Napoleon serta Kuda Laut.

Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI

DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KKHL. Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KKHL walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN. Berikut adalah infografis yang berisi informasi pelaku usaha yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar:




Gambar 18. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas terdapat 121 pelaku usaha aktif yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar pada tahun 2023. Dari pelaku usaha di atas terdapat 55 pelaku usaha yang memiliki SIPJI. Berikut adalah infografis yang berisi pelaku usaha yang memiliki SIPJI.

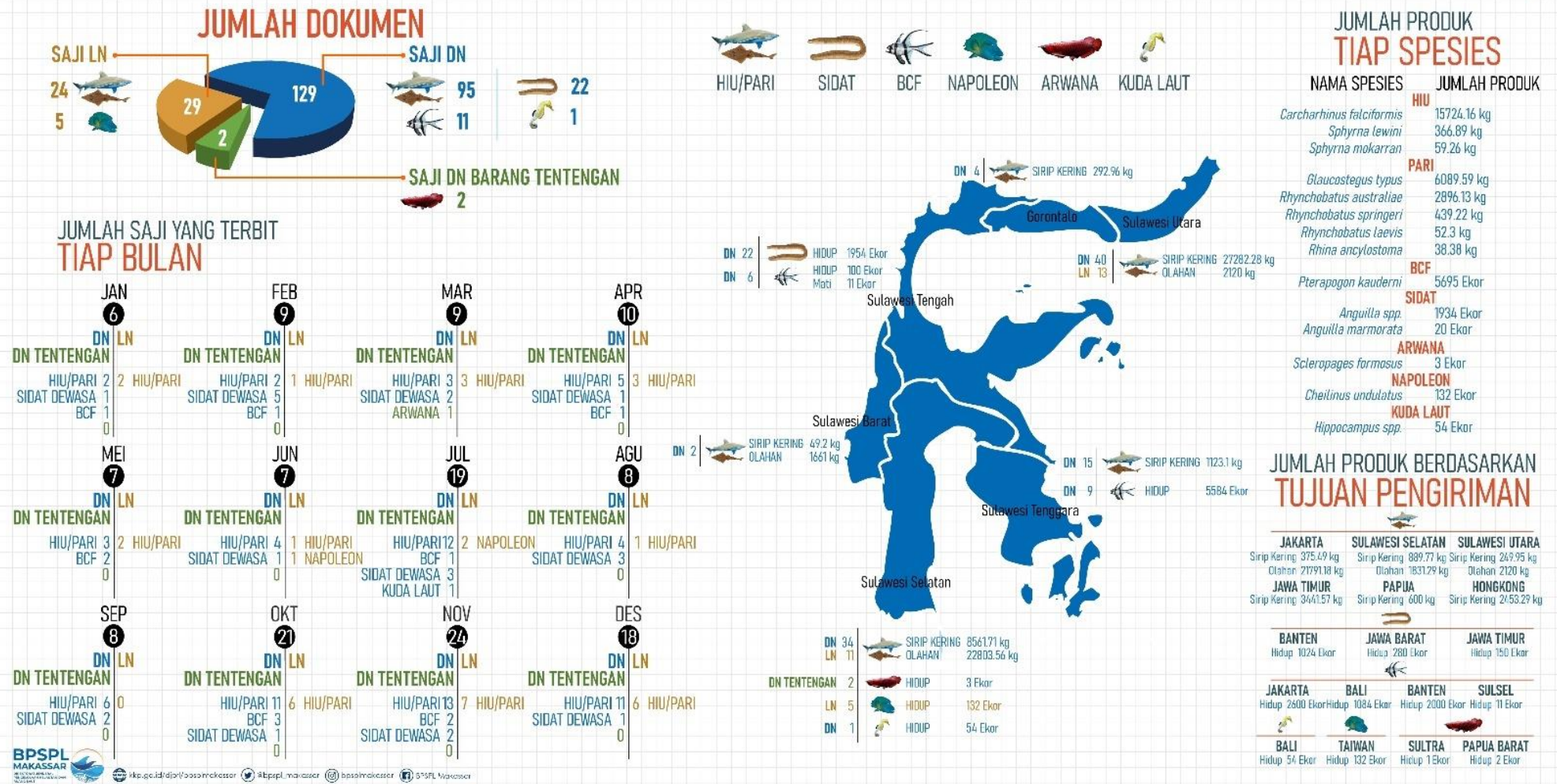


Gambar 19. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar



Jenis-jenis biota yang termasuk ke dalam kategori Appendix II Cites dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menggunakan SIPJI dalam pemanfaatannya yang menggunakan SAJI sebagai dokumen angkutnya. Jenis ikan yang berdasarkan kategori di atas yang diedarkan di wilayah kerja BPSPL Makassar melalui penerbitan dokumen SAJI antara lain: **Hiu dan Pari Appendix, Sidat, BCF, dan Arwana sera Napoleon.** Untuk detail produk pengirimannya bisa dilihat di infografis di bawah ini

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) DI BPSPL MAKASSAR TAHUN 2023



Gambar 20. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

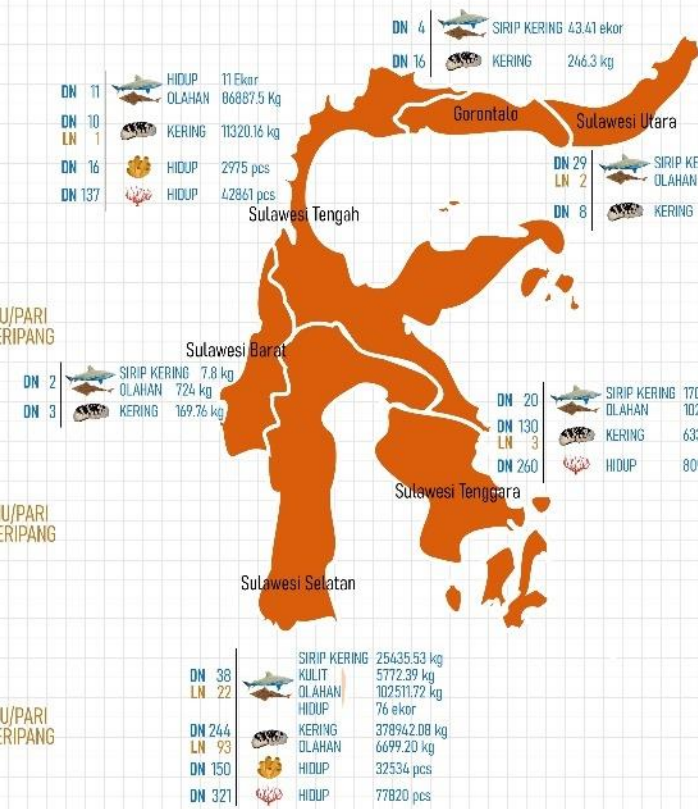
REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DI BPSPL MAKASSAR TAHUN 2023



JUMLAH REKOMENDASI YANG TERBIT TIAP BULAN

Bulan	Jumlah Dokumen	LN	DN
JAN	114	4	3
FEB	88	7	2
MAR	108	5	3
APR	116	8	4
MEI	138	9	7
JUN	141	6	11
JUL	120	9	12
AGU	122	1	11
SEP	103	5	6
OKT	152	8	6
NOV	175	9	5
DES	143	4	6

HIU/PARI TERIPANG ANEMON SOFT CORAL



JUMLAH PRODUK TIAP JENIS

Jenis	LN	DN
OLAHAN	17180 Kg	21729,22 kg
SIRIP KERING	22026,18 kg	11098,91 kg
HIDUP	0	87 ekor
KULIT	5772,39 Kg	0
OLAHAN	0	7436,53
KERING	31586,99 kg	421976,11 kg
HIU/PARI	35509 pcs	0
HIU/PARI	0	201675 pcs

JUMLAH PRODUK BERDASARKAN TUJUAN PENGIRIMAN

Daerah Tujuan	Spesies	Jumlah
JAKARTA	Sirip Kering	6542,55 kg
	Olahan	105352,72 kg
	Kulit	413 kg
BANTEN	Sirip Kering	1923,78 kg
	Kulit	961,23 kg
	Hidup	26 Ekor
JAWA BARAT	Sirip Kering	39,2 kg
	Olahan	2231 kg
	Hidup	0
JAWA TIMUR	Sirip Kering	1791,69 kg
	Olahan	75041,5 kg
	Hidup	37 Ekor
HONGKONG	Sirip Kering	22026,18 kg
	Olahan	0
	Hidup	0
KOREA SELATAN	Sirip Kering	0
	Olahan	0
	Hidup	0
JAKARTA	Kering	12575,27 kg
	Olahan	171,66 kg
	Kering	6203,86 kg
SULAWESI SELATAN	Kering	4939,77 kg
	Olahan	0
	Kering	22771,38 kg
JAWA TIMUR	Kering	387044,39 kg
	Olahan	6784,58 kg
	Kering	4886,92 kg
KEP. RIAU	Hiu/pari	8211 pcs
	Hiu/pari	27297 pcs
	Hiu/pari	3915 pcs
MALAYSIA	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
BALI	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
BANTEN	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
JAKARTA	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
BALI	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
JAWA TIMUR	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0
	Hiu/pari	0

Gambar 21. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

Informasi detail mengenai jumlah produk, asal pengiriman, dan tujuan pengiriman dapat diketahui melalui infografis di atas. Detail informasi tiap bulan dan tiap spesies juga terdapat pada infografis di atas.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui, antara lain:

- A. Ketidaksiplinan pengusaha dalam mengikuti SOP pelayanan BPSPL Makassar
- B. Ketiadaan petugas BPSPL Makassar di beberapa pintu keluar
- C. Keterlambatan dalam penerbitan dokumen SAJI atau SR
- D. SOP belum terimplementasikan dengan baik oleh petugas pelayanan
- E. Terdapat protes dari pelaku usaha terkait proses pelayanan perizinan yang diberikan bahkan sampai berujung protes keras yang berpotensi konflik.

2. Penyediaan data potensi dan status populasi jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES berupa pemeriksaan Stock Opname ke pelaku usaha



Kegiatan BAP Stock Opname dilakukan untuk memverifikasi jumlah jenis ikan khususnya yang terkategori appendix cites untuk memastikan jumlah stock yang tersedia dengan sisa kuota yang telah direalisasikan. Sedangkan untuk jenis *look alike* verifikasi dilakukan untuk memastikan jumlah produk di gudang walaupun tidak ada kuota untuk jenis *look alike*.



Berikut adalah hasil BAP Stock pelaku usaha yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar

Tabel 21. Pelaksanaan BAP Stock di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

No	Nama Perusahaan	Bentuk Produk	Nama Species	Volume (kg)	Jumlah (Ekor)	Asal Penangkapan	Provinsi
1	PT. Rohtadi	Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	2.000	3.500	Laut Sulawesi	Sulawesi Utara
			<i>Carcharhinus leucas</i>	700	1.400	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus obscurus</i>	20	13	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus sealei</i>	140	175	Laut Sulawesi	
			<i>Galeocerdo cuvier</i>	265	883	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus limbatus</i>	184	283	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus</i>	50	100	Laut Sulawesi	

No	Nama Perusahaan	Bentuk Produk	Nama Species	Volume (kg)	Jumlah (Ekor)	Asal Penangkapan	Provinsi
			<i>melanopterus</i>				
			<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	263	478	Laut Sulawesi	
			<i>Rhynchobatus australiae</i>	2.000	1.428	Laut Sulawesi	
			<i>Sphyrna mokarran</i>	1.500	1.500	Laut Sulawesi	
			<i>Sphyrna lewini</i>	1.500	2.142	Laut Sulawesi	
			<i>Sphyrna zygaena</i>	500	909	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	231	420	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus melanopterus</i>	556	2.780	Laut Sulawesi	
			<i>Triaenodon obesus</i>	200	1.333	Laut Sulawesi	
			<i>Rhina ancylostoma</i>	300	750	Laut Sulawesi	
			<i>Glaucostegus typus</i>	5.000	-	Laut Sulawesi	
2	UD. Sumber Laut	Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	20,44	50	Laut Sulawesi	Sulawesi Selatan
			<i>Carcharhinus falciformis</i>	1,5	4	Laut Sulawesi	
			<i>Sphyrna lewini</i>	51,92	69	Laut Sulawesi	
			<i>Sphyrna lewini</i>	2,5	4	Laut Sulawesi	
			<i>Carcharhinus limbatus</i>	41,23	46	Laut Sulawesi	
3	CV Karya Murni	Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	2076,65		Selat Makassar	Sulawesi Selatan
			<i>Carcharhinus leucas</i>	27,15			
			<i>Carcharhinus limbatus</i>	567,38			
			<i>Carcharhinus taurus</i>	15,33			
			<i>Prionace glauca</i>	4,42			
			<i>Carcharhinus signatus</i>	2,47			
			<i>Alopias sp.</i>	665,87			
			<i>Isurus sp.</i>	34,45			
			<i>Carcharhinus obscurus</i>	2.770,41			
			<i>Sphyrna lewini</i>	92,07			
		<i>Carcharhinus melanopterus</i>	16,1				
		Kulit	<i>Carcharhinus limbatus</i>	308,72			
			<i>Triaenodon obesus</i>	87,32			
			<i>Rhynchobatus australiae</i>	139,03			
			<i>Carcharhinus melanopterus</i>	10,86			
			<i>Carcharhinus falciformis</i>	52,96			
		Daging	<i>Glaucostegus typus</i>	1,77			
			<i>Carcharhinus limbatus</i>	15.234,74			
			<i>Prionace glauca</i>	1.064,12			
<i>Triaenodon obesus</i>	418,62						
<i>Sphyrna lewini</i>	1.247,47						

No	Nama Perusahaan	Bentuk Produk	Nama Species	Volume (kg)	Jumlah (Ekor)	Asal Penangkapan	Provinsi
			<i>Carcharhinus falciformis</i>	318,83			
4	La Nari	Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	257,5	645	Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
			<i>Sphyrna lewini</i>	49	87	Buton Selatan	
			<i>Prionace glauca</i>	13,3	45	Buton Selatan	
			<i>Carcharhinus plumbeus</i>	23	77	Buton Selatan	
			<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	8,6	22	Buton Selatan	
			<i>Carcharhinus brevipinna</i>	86	125	Buton Selatan	
			<i>Triaenodon obesus</i>	24,5	164	Buton Selatan	
			<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	4,3	8	Buton Selatan	
5	Luky Bagaskara	Sirip	<i>Prionace glauca</i>	1,53	3	Banggai	Sulawesi Tengah
			<i>Carcharhinus falciformis</i>	2	7	Banggai	
			<i>Carcharhinus melanopterus</i>	20	66	Banggai	
6	Muhammad Sadam	Daging	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	100	3	Tolitoli	Sulawesi Tengah
		Daging	<i>Carcharhinus falciformis</i>	900	30	Tolitoli	
7	UD Mikaila Indah/ Tendean Ris Engahu	Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	4,89	8	Laut Sulawesi & Teluk Tomini	Gorontalo
		Sirip	<i>Carcharhinus falciformis</i>	12,81	19	Laut Sulawesi & Teluk Tomini	
		Sirip	<i>Carcharhinus limbatus</i>	1,74	8	Laut Sulawesi & Teluk Tomini	
		Sirip	<i>Prionace glauca</i>	2,67	3	Teluk Tomini	
		Sirip	<i>Rhynchobatus australiae</i>	0,99	3	Teluk Tomini	
		Sirip	<i>Rhina ancylostoma</i>	0,23	1	Teluk Tomini	
		Sirip	<i>Sphyrna lewini</i>	0,41	1	Laut Sulawesi	
		Sirip	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	3,07	5	Laut Sulawesi & Teluk Tomini	

No	Pelaku Usaha	Jenis Ikan	Produk	Berat (kg)	Jumlah Ekor	Provinsi	Tanggal Pemeriksaan
1	Handri	<i>Anguilla, Sp</i>	Ikan Hidup	200	500	Sulawesi Tengah	29 Desember 2023
2	Graha Sidat Mandiri	<i>Anguilla, Sp</i>	Ikan Hidup	150	100	Sulawesi Tengah	29 Desember 2023
3	Muhamad Ali	<i>Anguilla, Sp</i>	Ikan Hidup	-	-	Sulawesi Tenggara	29 Desember 2023
4	Jumrin	<i>Anguilla, Sp</i>		-	-	Sulawesi Tenggara	29 Desember 2023

3. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi

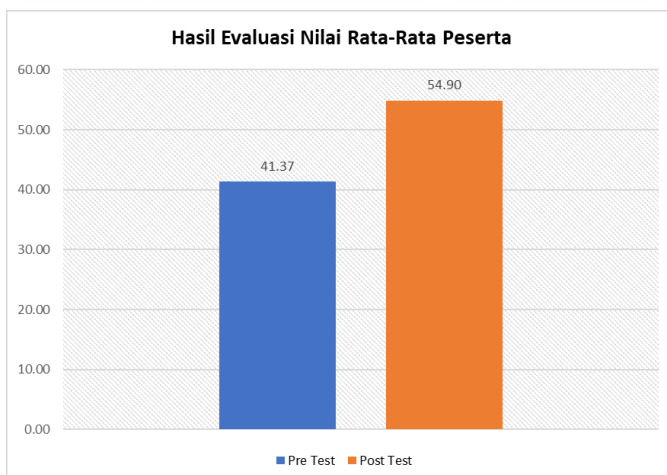
Sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan untuk menunjang kelestarian dan ketelusaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix Cites sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendix Cites. Selama tahun 2023, BPSPL Makassar sudah menyelenggarakan dua kegiatan sosialisasi yang diadakan di Kab. Pohowato, Gorontalo dan Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan sosialisasi di Kab. Pohowato berlangsung pada 24 Mei dan melibatkan Dinas Perikanan Kab. Pohowato, SKIPM Gorontalo, PSDKP Bitung, SKIPM Mamuju, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, DPM-PTSP, Lantamal, Penyuluh Perikanan, Pelaku usaha perikanan, dan nelayan.

Pelaksanaan sosialisasi di Kota Bau Bau berlangsung di tanggal 19 Juni dan melibatkan BPSPL Makassar, SKIPM Baubau, Dinas Perikanan Baubau, DKP Buton, DKP Buton Selatan, DKP Buton Tengah, Satwas PSDKP Baubau, Ditpolairud Baubau, Lantamal Baubau, penyuluh perikanan, pelaku usaha mitra BPSPL Makassar dan nelayan.

Pada Tanggal 14 September telah dilakukan Sosialisasi Pemnfaatan Jenis Ikan Dilindungi yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bontoharu, Kabupaten



para peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan pre test dan post test terdapat peningkatan sebesar 13% pada peserta sosialisasi.

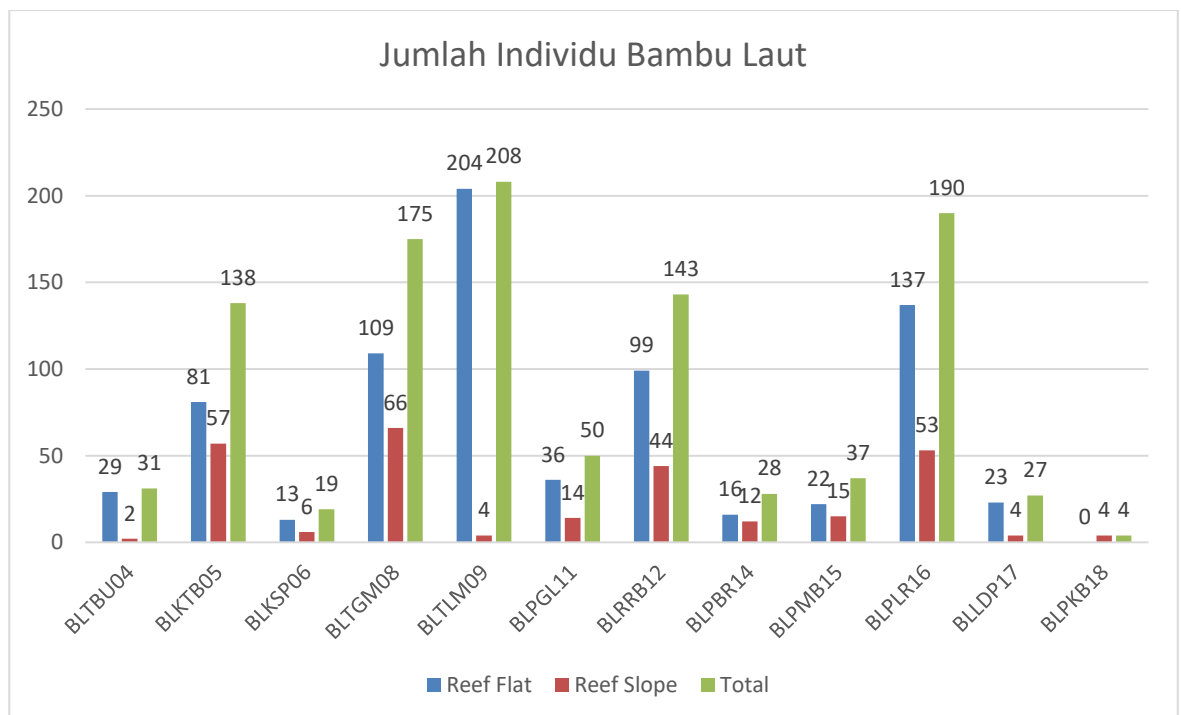


Pada tanggal 2 Oktober juga dilakukan sosialisasi di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan anggaran PNPB. Sosialisasi ini diikuti oleh Stasiun KIPM Luwuk Banggai, Pangkalan PSDKP Bitung Wilker Banggai, BKSDA Sulawesi Tengah Wilker Luwuk Banggai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Kawasan Konservasi Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banggai, PPI Pagimana,

Polairud Banggai, Lanal Luwuk Banggai, Penyuluh Perikanan pokmaswas, pelaku usaha perikanan, dan nelayan.

4. Survey Pendataan Populasi Bambu Laut

Survey pendataan populasi bambu laut dilaksanakan untuk mengetahui kelimpahan populasi dan pola sebaran *Isis hippuris*. Survey dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara dengan metode sapuan wilayah (*swept area*) yang biasa disebut transek sabuk (*belt transect*). Transek sabuk sepanjang 50 m, lebar pengamatan kiri dan kanan masing-masing 5 m, sehingga luas total areal pengamatan 500 m² tiap transek. Berdasarkan hasil survey, analisis data survei kelimpahan Bambu Laut di Konawe Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 22. Jumlah individu bambu laut berdasarkan hasil survey



Berdasarkan grafik di atas, survey dilakukan di **15 stasiun** dengan jumlah individu paling banyak di stasiun BLTLM09 dengan jumlah koloni sebanyak 208 sedangkan jumlah koloni paling sedikit terdapat di stasiun BLPKB18 dengan jumlah hanya empat koloni. Tingkat Kelimpahan koloni Bambu Laut di Perairan KKD Teluk Moramo Kab. Konawe Selatan berkisar antara antara 4 – 208 individu/500 m2 dengan

tingkat kepadatan 00,008 – 0,416 indv/m2 yang termasuk kategori Jarang – Melimpah, sedangkan rata-rata jumlah koloni yaitu 70 koloni dengan tingkat kepadatan 0,14 indv/m2 dengan kategori “Sedikit”. Berdasarkan zona terumbu karang, diperoleh bahwa Bambu Laut tersebar di wilayah rata-rataan karang (reef flat) dan daerah tubir (reef slope), dimana sebagian besar populasi Bambu laut tersebar pada daerah reef flat sebanyak 769 (73,24%) sedangkan pada daerah tubir sebanyak 281 koloni (26,76%).

G. Realisasi Anggaran

Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU 5

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Survei Populasi Bambu Laut	123.200.000	122,743,340	99.63
2	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi	729,800,000	728,949,584	99.88
4	Peningkatan Kompetensi SDM	170,600,000	170,170,415	99.75
JUMLAH		853,000,000	851,692,924	99.85

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran Tahun 2023 mencapai **Rp.851.692.924,- atau sudah 99.85% dari Pagu Rp. 853.000.000,-**.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU5 pada Triwulan I Tahun 2024 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi.

3.1.6 IKU6 Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Makassar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PNBP_{BPSPL\ MAKASSAR} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan dokumen Saji DN 1)+ pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan :

- 1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%
- 2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBPN x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBPN x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBPN x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 23. Capaian Realisasi IKU 8

SS - 6		Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Makassar						
IKU - 6		Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.000)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024
799.545,524	675.000	882.681,302	130.77 atau 120 (kinerjaku)	10.39	675.000	130.77 atau 120 (kinerjaku)		

Capaian pada IKU ini sudah melebihi target dengan capaian 868.681.302 rupiah dari target 675.000.000 rupiah atau mencapai 130.77% atau 120% capaian maksimal di kinerjaku. Kenaikan ini karena makin meningkatnya pemanfaatan jenis ikan khususnya jenis teripang.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 6 ini merupakan IKU yang realisasi targetnya adalah tahunan dan baru ada di tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian target sebelumnya capaiannya meningkat 10.39% namun capaian maksimal di kinerjaku adalah sama yaitu 120%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian IKU6 tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini adalah indikator baru yang ada di tahun 2022 dan belum terdapat di dokumen perencanaan strategis organisasi (renstra).

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

PNBPN Makassar didapat dari pemanfaatan jenis biota yang dilalulintaskan dan BPSPL Makassar memberikan pelayanan prima untuk pelayanan perizinan baik verifikasi lapangan untuk pengajuan dokumen SIPJI, penerbitan dokumen SAJI dan Rekomendasi untuk optimalisasi pemenuhan target PNBPN yang sudah ditetapkan serta pemberian sosialisasi yang kontinu. Realisasi IKU ini masih bisa dioptimalkan namun terdapat kendala dengan masih banyaknya pemanfaatan jenis ikan yang dikirimkan melalui jalur darat sehingga tidak mengajukan permohonan kepada BPSPL Makassar dan tidak membayar PNBPN. Untuk menanggulangi hal ini BPSPL Makassar secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta aktif berkoordinasi dengan PSDKP dan selaku instansi terkait yang mempunyai wewenang dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum seperti pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara illegal. Selain itu semakin banyaknya pelaku

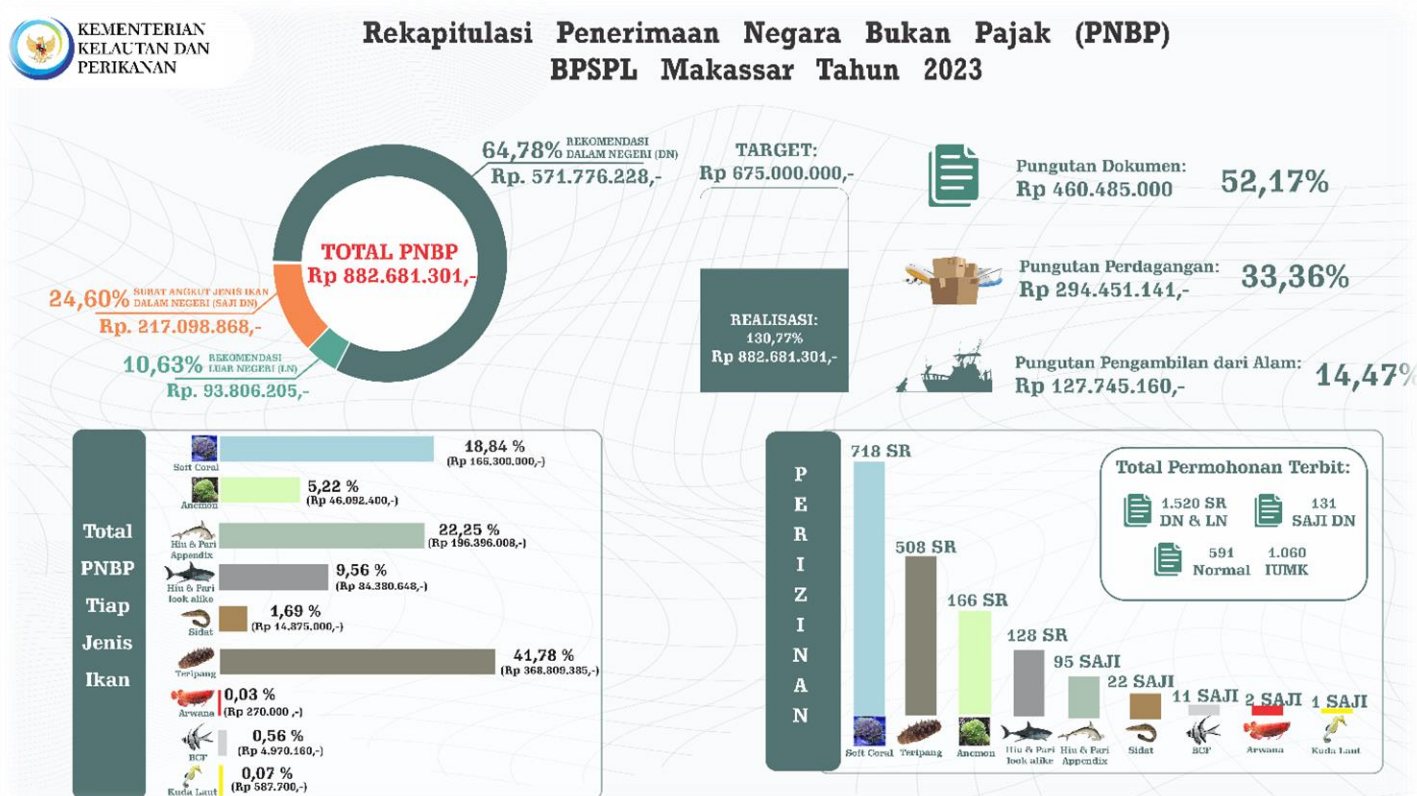
usaha yang beralih status menjadi IUMK membuat perkiraan PNBP berkurang karena pelaku usaha dengan status IUMK cukup membayar 25% untuk pungutan dokumen. BPSPL Makassar telah mengajukan revisi target PNBP Tahun 2023 dari 991 juta menjadi 675 juta rupiah.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target IKU8 tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus dan dapat dikatakan bahwa anggaran untuk pencapaian IKU 6 ini **adalah 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2023, PNBP BPSPL Makassar adalah **Rp 882.681.301,-** atau **120% dari target yang ditetapkan Rp. 675.000.000,-**. PNBP pemanfaatan jenis ikan terdiri dari tiga komponen yaitu: pungutan dokumen, pungutan perdagangan, dan pungutan pengambilan dari alam. Jenis-jenis yang dilalulintaskan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah **Hiu dan Pari (Appendiks dan look alike), Teripang, Sidat, BCF, Anemon, Soft Coral, dan Arwana**.



Gambar 23. Rekapitulasi PNBP Jenis Ikan di BPPSL Makassar Tahun 2023

Berdasarkan infografis di atas, komponen yang paling besar adalah pungutan dokumen dengan jumlah pungutan sebesar **Rp. 460.485.000,- atau 52.17%** dari total PNBP. Sedangkan jenis permohonan dengan komposisi PNBP paling besar adalah **Surat Rekomendasi** dengan total pungutan mencapai **Rp. 571.776.228,-** atau mencapai **64.78%** dari total PNBP. Sedangkan untuk jenis biota dengan pungutan paling banyak adalah **teripang** dengan total pungutan sebesar **Rp. 368.809.385 atau mencapai 41.78%** dari total PNBP.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja (PNBP BPSPL Makassar) ini sehingga dapat dikatakan **0 Rupiah**.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU6 pada Triwulan I masih sama yaitu berupa penarikan PNPB untuk pemanfaatan jenis ikan.

3.1.7 IKM7 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan reformulasi IKPA:
 - a. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
 - b. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
 - c. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.
2. Perubahan aspek dan indikator kinerja:
 - a. 3 Aspek:
 - 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
 - 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - b. 8 Indikator Kinerja:
 - 1) Revisi DIPA (10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
 - 3) Data Kontrak (10%)
 - 4) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - 6) Dispensasi SPM (5%)
 - 7) Penyerapan Anggaran (20%)
 - 8) Capaian Output (25%).

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Reformulasi IKPA 2022
1	Revisi DIPA	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi
2	Deviasi Hal III DIPA	<ul style="list-style-type: none">• Perhitungan deviasi per jenis belanja• Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum.• Batas maksimum deviasi per jenis belanja
3	Data Kontrak	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) Kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53.
4	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) persentase nominal GUP; (3) setoran TUP
5	Dispensasi SPM	Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV

6	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja
7	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual
8	Capaian Output	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 24. Capaian Realisasi IKU 9

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
93.57	93.75	95.35	101.71	1.9	93.75	101.71	90	105.94

Capain IKM 7 ini pada tahun 2023 adalah 95.36 dari target 93.57 atau dengan capaian 101.71%. Capaian ini meningkat 1.9% apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut adalah perbandingan nilai IKPA dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:



Berdasarkan grafik di atas nilai IKPA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun terdapat penurunan capaian realisasi karena kenaikan target yang cukup signifikan

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Nilai IKPA apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 90

sudah melebihi target dengan capaian 95.35.

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
88	99.32	89	98.73	89	93.57	93.75	95.36	90	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Untuk mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sesuai target telah dilakukan koordinasi yang baik antara banyak pihak yaitu perencana, tim keuangan, tim monev, dan para penanggung jawab kegiatan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Oprator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu. Serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU 7 diantaranya:

1. Menunjuk penanggung jawab kegiatan yang uraian tugasnya termasuk mengawasi capaian kinerja dan anggaran sehingga terdapat mekanisme pengawasan secara berjenjang.
2. Mengelola/menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan.
3. Mendorong tim pelaksana agar tidak menunda pelaporan pertanggungjawaban kegiatan sehingga tidak menghambat tim keuangan dalam penyampaian dokumen pendukung.
4. Mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan input SPM.
5. Menginput realisasi capaian output tiap bulan secara tepat waktu.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kinerja Nilai IKPA BPSPL Makassar ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2024 antara lain melaksanakan input realisasi capaian output setiap bulan dan melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan atau prognosa.

3.1.8 IKM8 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator perhitungan

NKA adalah Capaian Keluaran Kegiatan, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja ini yaitu nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja Setditjen PRL kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

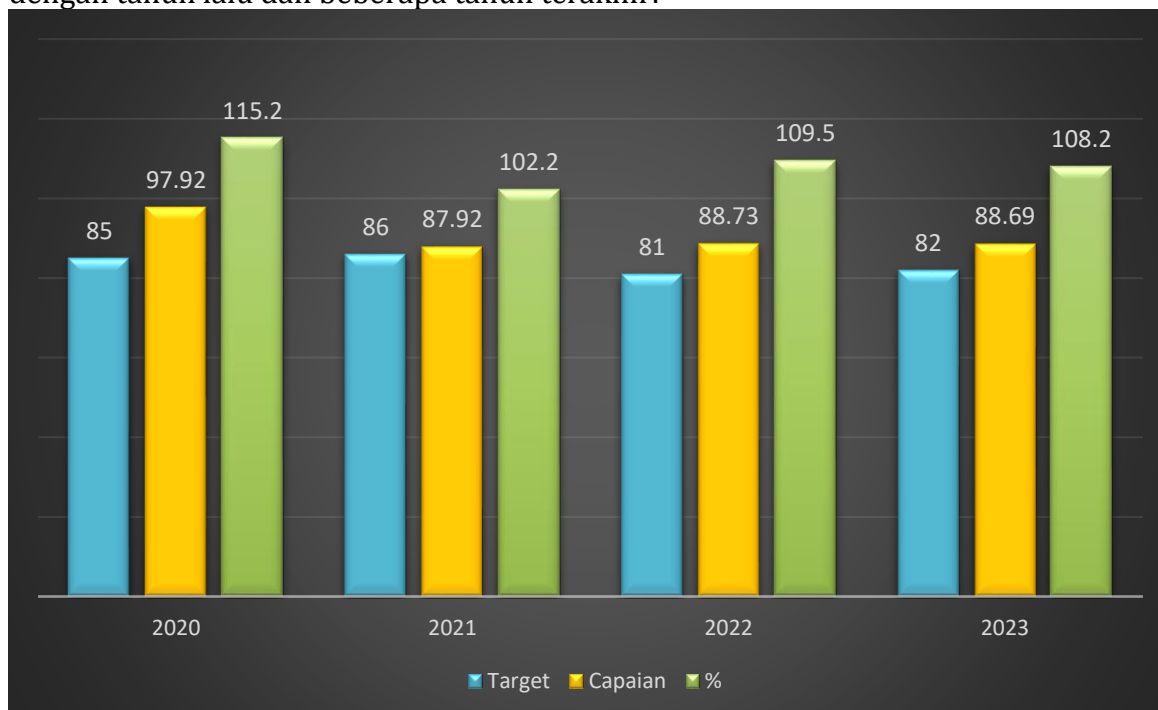
Tabel 25. Capaian Realisasi IKM 10

SS - 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM - 8		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
88.73	82	88.69	108.16	-0.05	82	108.16	89	99.65

Berdasarkan tabel di atas target IKM ini sudah tercapai dengan realisasi capaian 88.69 dari target 82. Namun capaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 0.05%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini selalu mencapai target dari tahun 2020 dengan realisasi dan persentase yang cukup stabil dari tahun 2021. Berikut adalah perbandingan NKA dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:



Berdasarkan grafik di atas, terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, namun juga terdapat kenaikan target apabila dibandingkan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
85	97.92	86	87.93	81	88.73	82	88.69	89	

Capaian IKM8 tahun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 99.65% dari target 89 dengan capaian 88.69.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan tepat waktu sehingga dapat merealisasikan anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan menunjuk 1 orang operator untuk menginput capaian output pada aplikasi Smart DJA. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat **dikatakan 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKM8 meliputi :

1. Merencanakan kegiatan yang matang sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu
2. Berusaha merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang sudah disusun
3. Pengisian Capaian Output pada aplikasi SAKTI setiap bulan

Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan pada indikator kinerja ini adalah keterlambatan dan ketidak tepatan dalam pengisian capaian output

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Nilai Kinerja Anggaran ini sehingga dapat dikatakan **0 Rupiah**.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung capaian IKM 8 di TW I 2024 adalah melaksanakan penyerapan anggaran yang efisien dan konsisten terhadap perencanaan serta melaksanakan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dengan tepat waktu.

3.1.9 IKM9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

5. Target Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2023 adalah 75. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

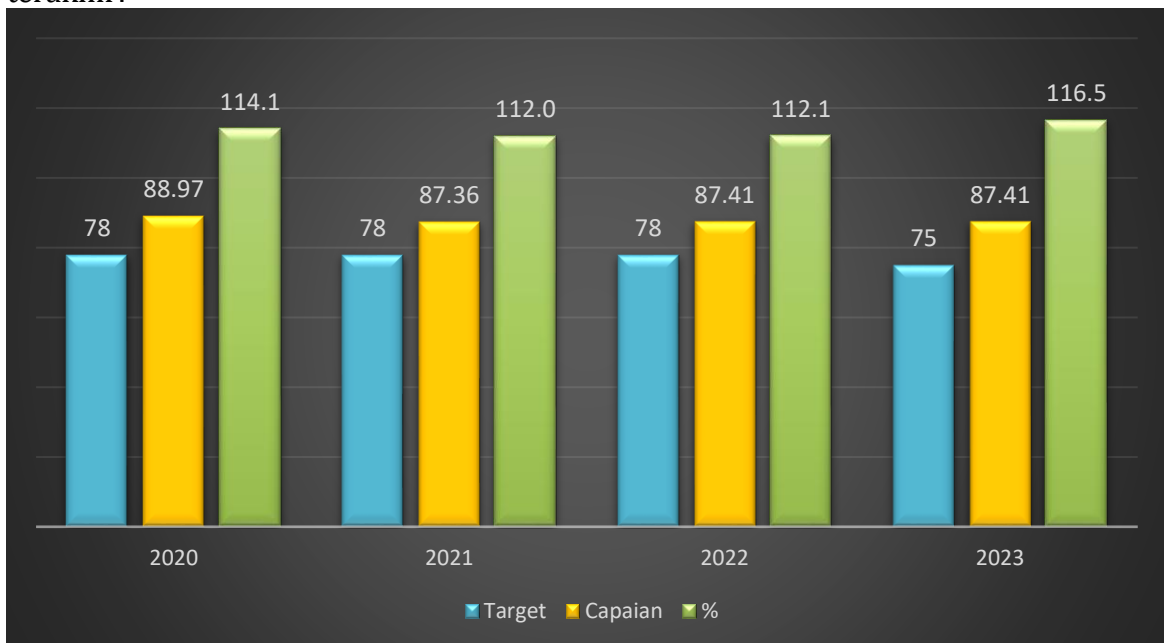
Tabel 26. Capaian Realisasi IKM 9

SS - 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM - 9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
87.41	75	87.41	116.55	0	75	116.55	78	112.06

Berdasarkan tabel di atas, IKM 9 ini sudah mencapai target dengan realisasi nilai 87.41 atau capaian 116.55% dari target 75.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut adalah perbandingan Nilai WBK dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:



Capaian di tahun 2023 memakai nilai capaian di tahun 2022. Hal ini dikarenakan nilai evaluasi tidak diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal, maka nilai yang dipakai adalah nilai periode sebelumnya. Namun walaupun memakai nilai yang sama, terdapat peningkatan persentase capaian. Hal ini dikarenakan adanya penurunan target yang ditetapkan oleh eselon 1.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sesuai dokumen Renstra BPSPL Makassar 2020-2024 capaian IKM9 pada tahun 2023 ini sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dimana capaian 2023 adalah 87.41 sedangkan target dalam Renstra adalah 78.

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
78	88.97	78	87.36	78	87.41	75	87.41	78	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini salah satunya adalah karena adanya komitmen pimpinan yang selalu mengingatkan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga keterlibatan semua pegawai BPSPL Makassar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah pelaksanaan yang melibatkan seluruh pegawai termasuk yang ada di wilker cukup berkoordinasi melalui online sehingga tidak membutuhkan realisasi anggaran yang signifikan.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pengumpulan dokumen dan pelaksanaan kegiatan tiap pokja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kegiatan pemenuhan dokumen yang melibatkan seluruh pegawai akan membuat implementasi nilai WBK menjadi menyeluruh. Hal tersebut dapat meningkatkan capaian nilai untuk IKU ini apabila dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal maupun Menpan RB.

Sampai dengan TW III 2023 sudah dilakukan penilaian oleh tim Inspektorat dan perbaikan maupun pemenuhan dokumen sudah dilakukan sesuai rekomendasi namun sampai dengan akhir Tahun 2023 belum ada hasil final penilaian dari Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu maka hasil penilaian masih memakai hasil penilaian tahun 2022.



Pada 22-24 Juni telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM (Internalisasi reformasi SDM) sekaligus sosialisasi internal WBK WBBM di Tana Toraja.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU11 pada Tahun 2023 adalah Rp. 27.050.000 dengan realisasi sebagai tabel Berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran IKM 11

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup KKP	27.050.000	25,212,170	93.21
JUMLAH		27.050.000	25.212.170	93.21

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I 2024 adalah pemenuhan dokumen pendukung WBK untuk persiapan pemantauan dan evaluasi.

3.1.10 IKM10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	0

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan

Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91-keatas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;

- Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
 - Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
 - Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{e}v\ 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{e}v\ 1 = IPASN\ \text{Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPL\text{e}v\ 2}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Profesional / Sangat Tinggi
81-90	Cenderung Profesional / Tinggi
71-80	Rentan Tidak Profesional / Sedang
61-70	Cenderung Tidak Profesional / Rendah
≤60	Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

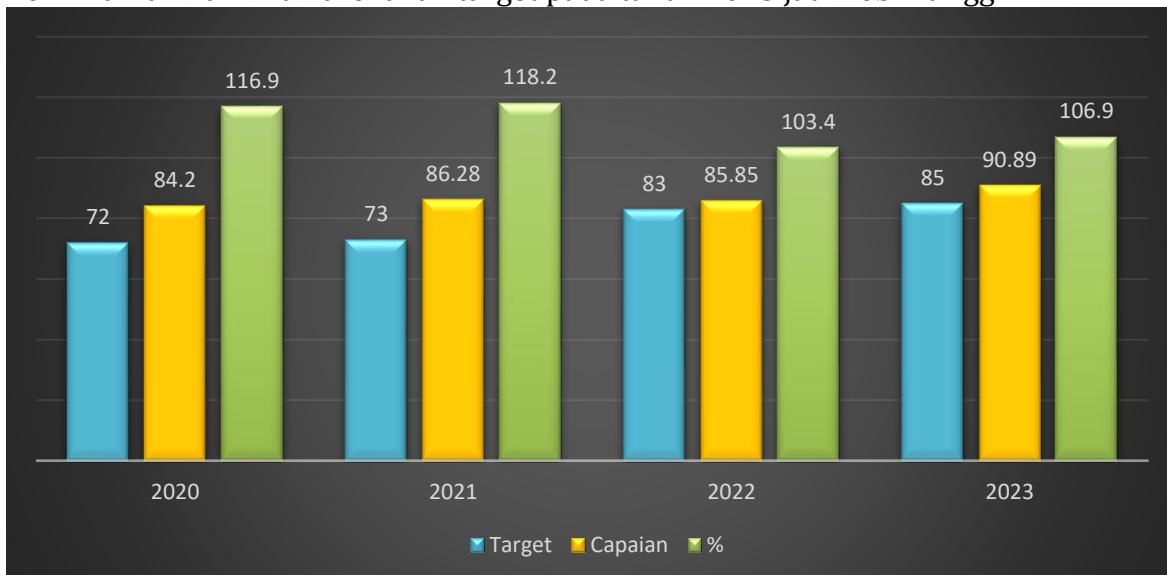
Tabel 28. Capaian Realisasi IKM 12

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
85.85	85	90.89	106.93	5.87	85	106.93	76	119.57

Capaian IKU sudah melebihi target dengan capaian 90.89 dari target 85. Capaian ini juga meningkat apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.87%

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IP ASN tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target yang ditetapkan. Capaian tahun ini merupakan nilai capaian tertinggi dengan nilai 90.87 walaupun persentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 namun hal ini dikarenakan target pada tahun 2023 jauh lebih tinggi



C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sesuai dokumen Renstra BPSPL Makassar 2020-2024, capaian IKM10 pada tahun 2023 ini sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dimana capaian 2023 adalah 90.89 sedangkan target dalam Renstra adalah 76.

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
72	84.2	73	86.28	83	85.85	85	90.89	76	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam peningkatan kompetensi SDM BPSPL Makassar pada Tahun 2023 dimana ada beberapa workshop yang diikuti oleh staf BPSPL Makassar dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya:

1. Keterbukaan informasi mengenai peluang untuk mengikuti pelatihan bagi seluruh BPSPL Makassar
2. Peran pimpinan yang selalu mendorong agar semua pegawai mengikuti semua peluang peningkatan kompetensi bagi yang memenuhi kriteria
3. Monitoring secara berkala terkait capaian IP ASN dan menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk memenuhi komponen yang ada di IP ASN

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam peningkatan kompetensi salah satunya karena banyak Pelatihan, Bimtek maupun seminar yang dilakukan secara online, sehingga sangat memudahkan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus menggunakan anggaran kantor atau 0 rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM10 pada Tahun 2023 diantaranya adalah dengan mengikutsertakan pegawai BPSPL Makassar dalam berbagai pelatihan, bimtek maupaun workshop yang ada. Selain itu BPSPL Makassar juga menyelenggarakan pelatihan sendiri yaitu pelatihan atau bimtek ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu serta Pelatihan verifikasi teknis KKPRL.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Profesionalitas ASN ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM10 pada Triwulan I 2024 adalah monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja Pegawai BPSPL Makassar dan menginstruksikan agar pegawai yang belum mengunggah sertifikat dan bukti kepelatihannya agar segera diunggah ke e-pegawai.

3.1.11 IKM11 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%),
4. Evaluasi kinerja (25%)

Teknik menghitung pemenuhan IKM ini adalah sebagai berikut Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 29. Capaian Realisasi IKM 13

SS - 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM - 11		Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
-	75	84.2	112.27	-	75	112.27	-	-

Capaian Nilai PM SAKIP sudah melebihi target dengan capaian nilai 84.2 dari target 75 atau dengan persentase capaian 112.27%. Indikator ini adalah indikator yang baru sehingga tidak terdapat capaian di periode tahun sebelumnya

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKM 11 ini merupakan IKM indikator kinerja yang baru ada di Tahun 2023

sehingga tidak ada capaian yang bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian IKM11 tahun ini belum bisa apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam renstra karena capaian IKU ini adalah tahunan sehingga tidak ada realisasi yang bisa dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang menyebabkan keberhasilan IKM ini adalah kompetensi tim pengelola kinerja yang baik, adanya pengawasan dan kontrol yang berlapis baik dari anggota tim kinerja yang lain maupun pimpinan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi target.

Sedangkan faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam capaian IKM ini adalah kurangnya pengawasan baik dari anggota tim yang lain maupun pimpinan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya berupa efisiensi anggaran dalam pelaksanaan IKM ini. Karena BPSPL Makassar adalah satker dengan nilai Rekonsiliasi tertinggi, maka BPSPL Makassar mendapat penghargaan berupa pembiayaan gratis pelatihan SAKIP kepada dua anggota tim pengelola kinerja. Hal ini merupakan salah bentuk efisiensi anggaran karena biaya pelatihan adalah sebesar tujuh juta rupiah per orang per paket.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM11 diantaranya :

1. Penunjukan Tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Makassar
2. Membuat mekanisme pengumpulan pelaporan kinerja
3. Melakukan rapat monev kinerja setiap bulan
4. Aplikasi kontrol atau pengawasan yang bertingkat dari level sesama anggota tim kinerja sampai dengan level pimpinan



Evaluasi penilaian AKIP di lingkup DJ PRL telah dilakukan pada Bulan Juni. Penilaian ini dilakukan secara mandiri oleh Tim Monev Seditjen dan didampingi oleh Inspektorat

Jenderal dan Biro Perencanaan KKP yang berlangsung pada Bulan Juni. Namun belum terdapat hasil penilaian AKIP dan saat ini masih menunggu perbaikan atau pemenuhan dokumen rekomendasi hasil penilaian. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan juga pleno untuk penetapan evaluasi hasil penilaian yang telah dilakukan.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk realisasi IKM ini adalah Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk peningkatan kompetensi tim pengelola kinerja.

Tabel 30. Realisasi Anggaran IKM 13

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penyusunan dan Pelaksanaan SAKIP dan LAKIP	26,307,000	25,890,492	98.42
JUMLAH		26,307,000	25,890,492	98.42

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM11 pada Triwulan I tahun 2024 adalah penyusunan PK, Rencana Aksi, Rincian Target, Manual IKU, kegiatan bulanan Monev, dan Reviu Rencana Aksi serta Penyusunan Laporan Kinerja.

3.1.12 IKM12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Teknik menghitung IKM14 ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 14

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
4	4	4	100	0	4	100		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKM14 memiliki target empat laporan di Tahun 2023. Target IKM ini adalah target triwulanan sehingga pada akhir tahun total capaian adalah empat dokumen.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja IKM12 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama dimana realisasinya adalah empat dokumen pada akhir tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Laporan SPIP adalah IKM dengan target triwulanan dengan realisasi satu

laporan setiap triwulan. Namun IKM ini adalah indikator yang baru saja ada di Tahun 2022 sehingga belum tertuang di target jangka menengah yang terdapat dalam renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan IKM12 adalah koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM14 adalah dengan melaporkan setiap progress dan capaian kegiatan serta mengidentifikasi resiko dari masing-masing kegiatan tersebut.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Laporan SPIP yang disusun ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung IKM ini pada Triwulan I 2024 adalah penyusunan laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024

3.1.13 IKM13 Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup BPSPL Makassar dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan dalam SI-MP. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan DJPRL ini, diantaranya:

- a. Dokumen (Bobot 20%): Perjanjian Kinerja Tahun 2022; Manual IKU Tahun 2022; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan Tahun 2022; dan Laporan Kinerja.
- b. Keikutsertaan (Bobot 10%): Persentase Pejabat Eselon II, Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dan Staf Pelaksana (minimal 2 orang); yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c. Keaktifan (bobot 70%): (upload dokumentasi kegiatan informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5 W 1 H, Karya tulis hasil penelitian penyaduran jurnal ataupun video atau campaign terkait K/L)

Cara Mengukur:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix).

- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
- Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- c. Pembobotan yang dimaksud antara lain:
- Konten dokumentasi kegiatan rapat /seminar/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5 W 1 H mendapatkan poin 0,5
 - Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas fungsi jabatan dengan poin 1
 - Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3
- d. Capaian dihitung dengan rumus:
- Pemenuhan Dokumen

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$
 - Keikutsertaan

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 10\%$$
 - Keikutsertaan

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang Aktif}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang Aktif}} \times 70\%$$
- e. Total Nilai Capaian MP: Nilai pemenuhan dokumen + Nilai Keikutsertaan + Nilai Keaktifan

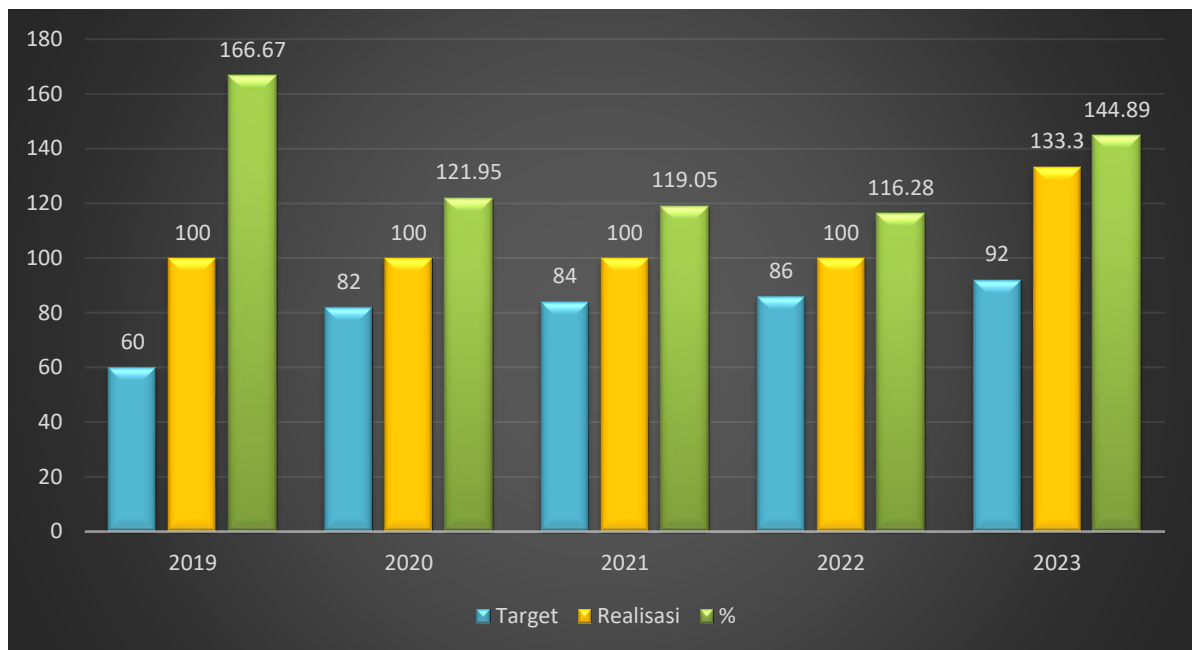
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 32. Capaian Realisasi IKM 13

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 13	Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
116.28	92	133.3	144.56 atau 120 (kinerjaku)	14.64	92	144.89 atau 120 (kinerjaku)	90	148.11

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa realisasi capaian pada tahun 2023 adalah 144.56% atau capaian maksimal di kinerjaku adalah 120%, capaian ini meningkat dari periode sebelumnya karena terdapat perubahan target di level 1 yang sebelumnya target 4 (empat) postingan menjadi 3 (tiga) postingan setiap bulan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Gambar 24. Grafik Perbandingan Capaian IKM 13 dari 2019 –2023

Berdasarkan grafik di atas capaian IKM ini selalu melebihi target, capaian IKM13 selalu mencapai nilai 100 pada setiap periodenya dan pada periode ini mencapai nilai 133.3. Capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah 144.56% atau 120% di kinerjaku. Kenaikan realisasi dan capaian ini karena terdapat penurunan target yang sebelumnya empat target per bulan menjadi tiga per bulan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja IKM15 dengan target jangka menengah organisasi

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
82	100	82	100	86	100	92	133.3	90	

Realisasi target IKM15 sudah melebihi target dengan realisasi 133.3. Apabila realisasinya dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang ada di renstra sudah mencapai 148.11% dari target 90.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengunggah aktivitas di Bitrix24 secara tepat waktu setiap bulan adalah penyebab keberhasilan tercapainya IKM ini. Komitmen ini dibuktikan dengan selalu terpenuhinya nilai maksimal 100 pada setiap periodenya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi sumber daya yang dilakukan karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IK13 ini adalah mengunggah kegiatan atau konten di aplikasi Bitrix24 secara berkala.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung system pengetahuan yang terstandar ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I 2024 adalah mengunggah kegiatan salah satunya dokumen Lkj Tahun 2023 dan untuk pejabat mengunggah kegiatan yang telah dilakukan.

3.1.14 IKM14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 14

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM- 14	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
100	75	100	133.33 atau 120 (kinerjaku)	0	75	133.33 atau 120 (kinerjaku)	80	125

Dari tabel di atas dilihat bahwa capaian indikator IKM14 pada Tahun 2023 **mencapai nilai 100** atau sudah **melebihi dari target nilai 75**, realisasi IKM ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100 sehingga tidak terdapat peningkatan capaian. Capaian tahun ini mencapai 133.3% atau capaian maksimal di kinerjaku adalah 120% dan apabila dibandingkan target pada renstra sudah melebihi target dengan capaian 125%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian TW III Tahun 2023 sama dengan capaian tahun lalu yang mencapai 100 atau 120% dari target di Perjanjian Kinerja.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKM ini Tahun 2023 sebesar 100 sudah melebihi target Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu 75. Capaian tersebut mencapai 133.33% atau 120% maksimal di kinerjaku, sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat dalam renstra yaitu 80, capaiannya mencapai 125%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung IKM14 dikarenakan arahan pimpinan yang jelas tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi di semua staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian rekomendasi itjen tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian progress IKM14 pada Tahun 2023 adalah berkat koordinasi dan kerjasama yang baik antara bagian teknis (Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian), penanggungjawab BMN dan Keuangan sehingga rekomendasi Itjen dapat segera diselesaikan.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk kinerja (Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan) ini

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM14 pada Triwulan I tahun 2024 adalah melakukan pertanggung jawaban dan pengadministrasian yang baik sehingga akan memudahkan apabila dilakukan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal.

3.1.15 IKM15 Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2023.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

$$\text{Target} = 100$$

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjajaku adalah 100.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 17

SS - 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 15	Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)							
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
100	100	100	100	0	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator IKM15 sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Dimana dari **target 100 realisasi yang dicapai adalah 100** atau dengan **presentase capaian sebesar 100%**.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Nilai rekonsiliasi kinerja tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya **selalu mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%**.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sesuai dokumen Renstra BPSPL Makassar 2020-2024, capaian IK15 pada tahun 2022 ini sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Kesigapan BPSPL Makassar dalam menyelesaikan temuan dari BPK adalah penyebab keberhasilan kenapa IK ini dapat terpenuhi targetnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang dilakukan untuk menunjang pencapaian IK16 dapat meliputi:

1. Untuk meminimalisir temuan BPK terhadap laporan keuangan BPSPL Makassar maka sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dibuat dokumen manajemen resiko.

2. Membuat mekanisme (SOP) pengajuan UP/GUP dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Presentase Penyelesaian Temuan LHK BPSPL Makassar ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

I. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Tidak ada kegiatan khusus yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU17 pada Triwulan IV 2023, karena IKM ini termasuk bersifat isidentil yang tidak bisa direncanakan atau ditetapkan periodenya karena menunggu saat ada audit dari BPK.

3.1.16 IKM16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/ strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti evaluasi yang telah diperoleh.
4. *Penilaian* efektivitas

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan focus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal (sesuai dengan jenis kegiatannya) dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 36. Capaian Realisasi IKM 16

SS - 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM - 16		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)						
Realisasi 2022	Tahun 2023				Tahun 2023		Renstra 2020 - 2024	
2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kenaikan thdp Tahun 2022 %	Target PK 2023	% Realisasi thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
90	77.5	100	129.03 atau 120 (kinerjaku)	11.1	77.5	133.33 atau 120 (kinerjaku)	80	125

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator IKM16 sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana dari **target 77.5 realisasi yang dicapai adalah 100** atau dengan **presentase capaian sebesar 129.03% atau 120%** pada capaian maksimal di kinerjaku. Realisasi IKM ini apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan 11.1% dan apabila dibandingkan dengan target pada renstra mencapai capaian 125% dari target 80.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi efektifitas pelaksanaan bantuan pemerintah tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan dimana tahun lalu nilai IKU ini adalah 90 dan tahun ini adalah 100 berdasarkan grafik di bawah ini:



C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
82	100	75	90	90	100	90	

Sesuai dokumen Renstra BPSPL Makassar 2020-2024, capaian IKM16 pada tahun 2023 ini sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 80 yang berarti sudah mencapai 120% dari target dengan catatan target dalam renstra tidak mengalami perubahan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor keberhasilan IKM ini didukung oleh komunikasi yang baik antara BPSPL Makassar dan kelompok penerima bantuan kompak. Sehingga dengan komunikasi yang baik ini penyampaian laporan menjadi lebih lancar dan pemanfaatan bantuan bisa lebih optimal karena kelompok dapat dibimbing apabila tidak mengerti penggunaan barang bantuan yang telah disalurkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggabungkan kegiatan ini dengan pelaksanaan Monev Kompak sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang IK ini adalah 0 rupiah karena anggaran sudah terdapat di kegiatan Monev bantuan Kompak.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

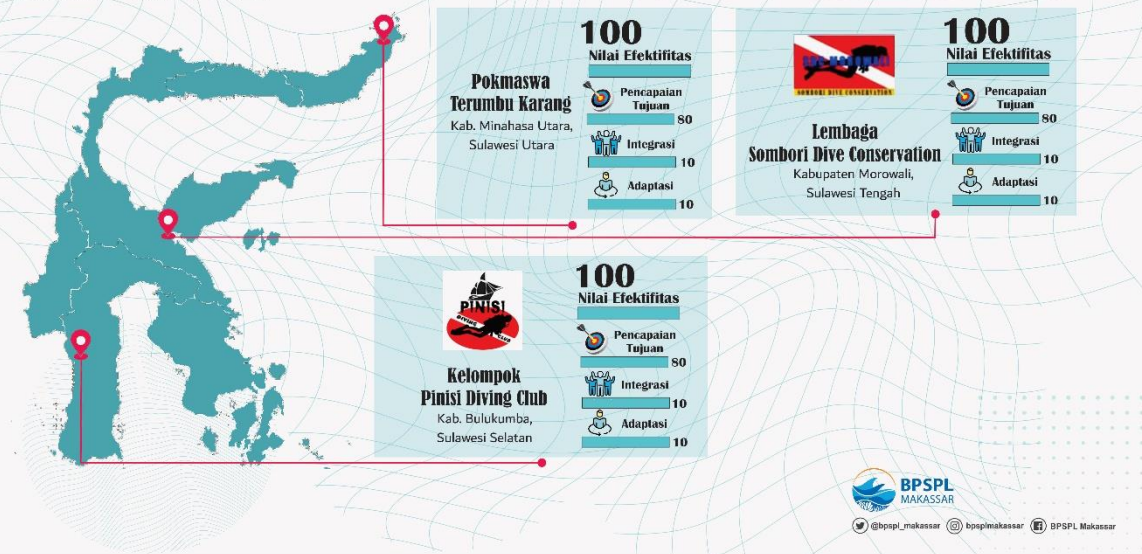
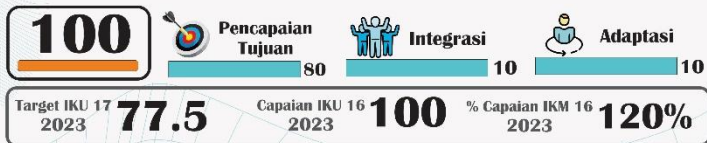


telah dilakukan monev bantuan Kompak untuk sekaligus sebagai *self assessment* penilaian efektifitas bantuan KOMPAK. Kelompok yang dinilai adalah kelompok yang menerima bantuan pada Tahun 2022. Ada tiga kelompok yang akan dinilai efektifitasnya yaitu Kelompok Pinisi Diving Club di Kabupaten Bulukumba dan Pokmaswas Terumbu

Karang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil *self assessment*, nilai efektifitas bisa dioptimalkan dengan beberapa catatan untuk perbaikan dan pada penilaian mandiri dari Itjen dan Seddit PKRL didapatkan bahwa Nilai Efektifitas BPSPL Makassar telah mendapat nilai maksimal 100. Berikut adalah infografis monev efektivitas bantuan pemerintah tahun 2023:

Nilai Efektifitas

Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar Tahun 2022



G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah, namun pada penyusunan anggaran PNBP telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan monev efektifitas ini dengan memasukkan pada mata anggaran pelayanan jenis .

H. Rencana Aksi Triwulan I 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2023 adalah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat penerima bantuan Kompak untuk persiapan pelaksanaan monev efektifitas bantuan.

Kegiatan Non-IKU

Selain kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan menjadi indikator kinerja, BPSPL Makassar juga melaksanakan kegiatan selain di dalam perjanjian kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- **Pengelolaan BMN, Rekonsiliasi, Pemantauan, dan Penilaian BMN**
Rekonsiliasi dan Pemantauan BMN dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulanan
- **Pengisian Capaian eMoney Bappenas**
Pengisian eMoney Bappenas dilakukan setiap bulan dalam setahun, dan pada tahun 2023 pengisian eMoney Bappenas sudah 100% untuk pengisian komponen dan rincian output
- **Bimbingan untuk mahasiswa PKL**
Pada tahun 2023 sudah ada **38 mahasiswa** yang melakukan kerja praktik dan magang di BPSPL Makassar.
- **Pengelolaan Arsip, Pemantauan, dan Penilaian Arsip**
Pada tahun 2023 BPSPL Makassar mendapat **predikat B (Sangat Baik)** pada verifikasi penilaian arsip dengan nilai **72.67**

- **Kegiatan Bulan Cinta Laut**



Kegiatan BCL pada awalnya merupakan kegiatan yang ada pada perjanjian kinerja dan menjadi indikator kinerja utama. Namun indikator kinerja ini dihapus pada perjanjian kinerja karena anggaran untuk kegiatan ini diblokir seluruhnya. Walaupun demikian, tetap terdapat pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran dari pusat (Direktorat P4K). Kegiatan dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Kota Makassar, Kota Bitung, dan Kota Palu. Sampai dengan akhir TW III, kegiatan bersih Pantai telah dilaksanakan dan data sampah yang dikumpulkan di Kota Makassar, Palu dan Bitung dapat dilihat pada infografis di atas.

- **Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan (Bimtek ISO dan Sertifikasi ISO)**



Pada tahun 2023 BPSPL Makassar telah menyelenggarakan bimbingan teknis ISO di Kota Makassar. Peningkatan kompetensi ini diikuti oleh seluruh pegawai BPSPL Makassar untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan public yang dilakukan sertifikasi yaitu pemberian Surat Rekomendasi dan SAJI DN. Setelah dilakukan bimbingan teknis dilanjutkan dengan pemenuhan dokumen sebagai prasyarat untuk sertifikasi ISO 9001:2015 terkait mengenai sistem manajemen mutu setelah dilakukan proses audit internal dan eksternal. Setelah pelaksanaan semua proses tersebut, BPSPL Makassar mendapat sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada tanggal 29 Desember 2023.

3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

Indikator Kinerja		BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG	
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja... (Dokumen)	Target	3	3	3	3	3	
		Capaian	3	3	3	3	3	3
		%	100	100	100	100	100	100
2	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja.... (Daerah)	Target	1	1	2	1	2	2
		Capaian	2	2	3	1	4	2
		%	120	120	120	100	120	100
3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja.... (Kelompok)	Target	3	3	3	2	3	3
		Capaian	3	3	3	2	3	3
		%	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	Target		30				
		Capaian		36.44				
		%		120				
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan	Target	6	7	7	6	4	4
		Capaian	10	10	10	9	6	7

	Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja (Jenis)	%	120	120	120	120	120	120
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di wilayah kerja.... (Jenis)	Target	5	3	6	5	4	2
		Capaian	10	6	8	7	6	5
		%	120	120	120	120	120	120
6	Nilai PNBPN (Rp.000)	Target	675.000	900.000	523.347	850.000	2.550.000	718.180
		Capaian	882.681,302	2.376.620,820	958.877,695	3.037.033,914	3.030.253.433	1.647.742,75
		%	120	120	120	120	120	120
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup..... (Nilai)	Target	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75
		Capaian	95.35	93.03	95.34	89.95	94.6	91.83
		%	101.71	99.23	101.7	95.95	100.91	97.95
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup (Nilai)	Target	82	82	82	82	82	82
		Capaian	88.69	85.85	90.24	87.39	89.66	92.11
		%	108.16	104.7	110	106.57	109.34	112.33
11	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)	Target	75	75	75	75	75	75
		Capaian	87.41	90.81	93.31	87.57	85.68	81.64
		%	116.55	120	120	116.76	114.24	108.85
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup (Indeks)	Target	85	83	85	85	85	85
		Capaian	90.89	90.84	90.82	90.43	90.33	89.17
		%	106.91	109.45	106.85	106.39	106.27	104.91
12		Target		75				

	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPSPL Pontianak (inovasi)	Capaian		88.2				
		%		117.6				
13	Nilai PM SAKIP(Nilai)	Target	75	75	75	75	75	75
		Capaian	84.2	88.2	88.2	84.2	82.95	82.70
		%	112.27	117.6	117.6	112.27	110.6	110.27
14	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup (Dokumen)	Target	4	4	4	4	4	4
		Capaian	4	4	4	4	4	4
		%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Unit Kerja Lingkup yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Target	92	92	92	92	92	92
		Capaian	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3	133.3
		%	120	120	120	108.88	120	120
16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Target	75	75	75	75	75	75
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	120	120	120	120	120	120
17	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup(%)	Target	100	100	100	100	100	100
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	100	100	100	100	100	100
18	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup (%)	Target	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5
		Capaian	100	100	100	100	86	86
		%	120	120	120	120	110.97	110.97

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 38. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2023

Program	Anggaran Rupiah Murni dan PNBP			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Program Kualitas Lingkungan Hidup	2,872,000,000	2,739,017,502	95.37	132,982,498
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1,858,000,000	1,855,952,059	99.89	2,047,941
Program Dukungan Manajemen	10,805,785,000	10,644,272,605	98.51	161,512,395
TOTAL	15,535,785,000	15,239,242,166	98.09	296,542,834

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2023, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.15.535.785.000,- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Lima Ribu Rupiah)**. Pada pagu ini terdapat blokir RO sebesar Rp. 125.000.000 yang tetap tidak bisa dihapus sampai akhir. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 15.239.242.166- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah)** atau **98.09% dari Pagu**. Sisa anggaran adalah sebesar **Rp 296.542.834,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**.

Pada tahun 2023 revisi anggaran sudah dilaksanakan beberapa kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:

Tabel 39. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2023

Tanggal	Keterangan
8 Maret 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.293/BPSPL.3/RC.420/III/2023 Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
12 April 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.427/BPSPL.3/RC.420/IV/2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-032.07.2.47743
5 Juni 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.591/BPSPL.3/RC.420/VI/2023 Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

10 Juli 2023	Surat kepala BPSPL Makassar Nomor B.766/BPSPL.3/RC.420/VII/2023 Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional (POK)
15 Agustus 2023	Revisi Penambahan Pagu yang bersumber dari pemanfaatan PNBPN Tahun Anggaran 2023. Revisi ini bersifat terpusat sehingga seluruh UPT mengajukan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran
06 Oktober 2023	Surat kepala BPSPL Makassar perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
6 Oktober 2023	melakukan revisi pembukaan blokir anggaran untuk kegiatan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dilakukan yang di lakukan terpusat oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk seluruh UPT Lingkup DJPKRL
26 Oktober 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.1272/BPSPL.3/RC.420/X/2023 Prihal Revisi Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
13 November 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor Perihal B.1347/BPSPL.3/RC.420/XI/2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
07 Desember 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.1455/BPSPL.3/RC.420/XII/2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
20 Desember 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.1501/BPSPL.3/RC.420/XII/2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
27 Desember 2023	Surat Kepala BPSPL Makassar surat Kepala BPSPL Makassar Nomor B.1520/BPSPL.3/RC.420/XII/2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.47743120



photo by: Audi Sumendap (BPSPL Makassar)

BAB IV

PENUTUP



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2023 adalah kategori **istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **113.05%**, sementara capaian realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 15.239.242.166-** (**Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah**) atau **98.09% dari Pagu Rp.15.535.785.000,-**

Capaian Indikator Kinerja Utama dan Manajerial pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar telah tercapai tiga dokumen dari target tiga dokumen berupa capaian dokumen laporan sosialisasi, verifikasi, dan monitoring pemanfaatan KKPRL.
2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL telah tercapai tiga daerah atau provinsi dari target satu daerah dengan capaian provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo
3. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai tiga kelompok dari target tiga kelompok.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai 10 jenis dari kegiatan pendataan, survei, sosialisasi, dan respon cepat dari target enam jenis.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah tercapai 10 jenis dari kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dari target lima jenis.
6. Nilai PNBP BPSPL Makassar telah mencapai 882.681.302 rupiah dari target 675 juta rupiah dari PNBP pemanfaatan jenis ikan.
7. Nilai IKPA BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 95.35 dari target 93.75.
8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 88.69 dari target 82.
9. Nilai WBK BPSPL Makassar telah memenuhi target dengan nilai 87.41 dari target 75. Nilai ini berdasarkan pantauan tahun 2022.
10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 90.89 dari target 85.
11. Nilai PM SAKIP BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 84.2 dari target 75.
12. Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target dengan empat target yang disusun setiap triwulan.
13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai target dengan nilai 133.33 dari target 92.

14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai target dengan capaian 100 dari target 75.
15. Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100 dari target 100.
16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan nilai 100 dari target 77.5

4.2 Rekomendasi

Untuk mendukung capaian kinerja BPSPL Makassar tahun 2024, maka direkomendasikan adanya pelaksanaan dialog kinerja pada triwulan I. Pelaksanaan dialog kinerja ini untuk menentukan anggota tim kelompok kerja, proses cascading atau penyusunan MPH, serta Langkah taktis untuk meningkatkan kinerja BPSPL Makassar tahun 2024.

Selain itu direkomendasikan juga upaya pembukaan blokir anggaran tahun 2024. Blokir ini akibat ketiadaan RO pada waktu penyusunan anggaran sehingga terdapat anggaran pengadanan sarana prasarana yang diblokir akibat ketiadaan RO.

4.3 Tindak Lanjut

Terdapat rekomendasi pada Triwulan III Tahun 2023 yang harus dilakukan tindak lanjut pada Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 40. Tindak lanjut atas rekomendasi TW I Tahun 2023

Rekomendasi TW III Tahun 2023	Tindak Lanjut atas Rekomendasi TW III Tahun 2023
Koordinasi ke bagian program Sesditjen PKRL terkait rencana pembukaan blokir untuk meningkatkan nilai IKPA	Koordinasi telah dilakukan dan pembukaan blokir serta realisasi anggaran telah dilaksanakan pada triwulan IV. Hal ini berdampak pada capaian nilai IKPA BPSPL Makassar yang cukup baik dan mencapai target dengan nilai 95.35 dari target yang cukup tinggi yaitu 93.75



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Getreda Melsina Hehanussa

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar

Getreda Melsina Hehanussa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		4.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5

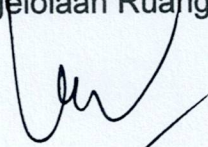
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran	7.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	8.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	991.212
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.600.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	50.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	10.805.785.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL Makassar) Tahun 2023		14.755.785.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar



Getreda Melsina Hehanussa



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Yudiarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	1
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
6.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	6.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	675.000
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	82
		9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	85
		11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	75
		12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.808.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.872.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	50.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	10.805.785.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL Makassar) Tahun 2023		15.535.785.000

Jakarta,30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.2066 /DJPR/ RC.610/IX/2023 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Lingkup DJPKRL

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 29/KEPDJPR/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kinerja dan Teguran Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, **terima kasih** atas partisipasi aktif Unit Kerja Saudara dalam pencapaian DJPKRL Triwulan II Tahun 2023.

Sebagai salah satu bentuk apresiasi, berikut **Piagam Penghargaan** Unit Kerja Saudara atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kategori Istimewa (nilai 110 – 120) dan Baik (nilai 90 - <110). Kiranya penghargaan ini menjadi **motivasi** bersama untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo



Lampiran 1. Surat

Nomor : B.06/DJPRL/ RC.610/IX/2023

Tanggal : 18 September 2023

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
3. Direktur Jasa Kelautan
4. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
8. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
9. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
10. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
11. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
12. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 2. Surat

Nomor : B. 3066 /DJPRL/RC.610/IX/2023

Tanggal : 18 September 2023

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2023

No	Unit Kerja	NKO	Kategori
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	108.36	Baik
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	108.99	Baik
3.	Direktorat Jasa Kelautan	99.52	Baik
4.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	116.24	Istimewa
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	102.58	Baik
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	116.47	Istimewa
7.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	115.65	Istimewa
8.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	102.82	Baik
9.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	116.41	Istimewa
10.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	110.91	Istimewa
11.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	116.40	Istimewa
12.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	105.94	Baik

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Keterangan:

Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (108.36)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo
Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT JASA KELAUTAN

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (99.52)
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Jakarta, 10 Juli 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (116.24)
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (108.99)
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Jakarta, 10 Juli 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (102.58)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (116.47)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (115.65)
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Jakarta, 10 Juli 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (102.82)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo
Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (116.41)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (110.91)
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Jakarta, 10 Juli 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (116.40)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (105.94)
TRIWULAN II TAHUN 2023

Jakarta, 10 Juli 2023
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.3623/DJPKRL/ RC.610/XI/2023 21 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Lingkup DJPKRL

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 29/KEPDJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kinerja dan Teguran Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, **terima kasih** atas partisipasi aktif Unit Kerja Saudara dalam pencapaian DJPKRL Triwulan III Tahun 2023.

Sebagai salah satu bentuk apresiasi, berikut **Piagam Penghargaan** Unit Kerja Saudara atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kategori Istimewa (nilai 110 – 120) dan Baik (nilai 90 - <110). Kiranya penghargaan ini menjadi **motivasi** bersama untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 1. Surat

Nomor : B.3623/DJPKRL/ RC.610/XI/2023

Tanggal : 21 November 2023

DAFTAR PEJABAT

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Direktur Jasa Kelautan
5. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
8. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
9. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
10. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
11. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
12. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 2. Surat

Nomor : B.3623/DJPKRL/ RC.610/XI/2023

Tanggal : 21 November 2023

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2023

No	Unit Kerja	NKO	Kategori
1	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	117.43	Istimewa
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	112.47	Istimewa
3	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	104.93	Baik
4	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	111.49	Istimewa
5	Direktorat Jasa Kelautan	112.59	Istimewa
6	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	93.42	Baik
7	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	106.67	Baik
8	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	111.11	Istimewa
9	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	116.67	Istimewa
10	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	111.11	Istimewa
11	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	117.78	Istimewa
12	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	116.67	Istimewa
13	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	106.67	Baik

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Keterangan:

Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (112.47)
TRIWULAN III TAHUN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (104.93)
TRIWULAN III TAHUN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (111.49)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT JASA KELAUTAN

ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (112.59)
TRIWULAN III TAHUN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (93.42)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (106.67)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (111.11)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (T16.67)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (111.11)
TRIWULAN III TAHUN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (117.78)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT ISTIMEWA (T16.67)
TRIWULAN III TAHUN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



PIAGAM PENGHARGAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Diberikan Kepada Unit Kerja :

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

**ATAS NILAI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PREDIKAT BAIK (106.67)
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Oktober 2023

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR**

Jl. Makmur Daeng Sitakka No. 129 Maros Sulawesi Selatan 90511 | Telp/Fax. 0411-371337
E-mail : bpsplmakassar@kkp.go.id
Laman : www.kkp.go.id/bpsplmakassar